



POLITIK EKONOMI PELESTARIAN WARISAN BUDAYA TROWULAN

Kepentingan terhadap warisan budaya di Trowulan telah menyiratkan sebuah perbedaan sesuai konteks zaman. Kepentingan politik terhadap penggunaan simbol-simbol kebesaran Majapahit pernah berlangsung pada zaman pergerakan nasional. Pada masa Orde Baru, klaim terhadap kebesaran Majapahit kembali ditempatkan sebagai simbol persatuan wilayah NKRI. Perhatian terhadap peninggalan sisa-sisa Majapahit di Trowulan baru secara serius dimulai tahun 1986, ketika pemerintah membuat Rencana Induk Arkeologi (RIA) Bekas Kota Kerajaan Majapahit Trowulan.

RIA Bekas Kota Kerajaan Majapahit Trowulan menjadi semacam acuan dalam program-program pelestarian Trowulan selanjutnya. Namun sayangnya, program-program pelestarian tersebut dianggap sejumlah kalangan belum banyak berhasil. Banyak faktor yang menyumbang ketidakberhasilan tersebut, salah satu yang mungkin menjadi penting adalah ketidakseriusan dalam menyusun program-program pelestarian.

Buku ini tidak membahas Trowulan dalam perspektif arkeologis, namun lebih menggunakan pendekatan politik-ekonomi. Buku ini dapat memberikan gambaran bahwa program pelestarian warisan budaya di Trowulan begitu kental dengan kepentingan politik dan ekonomi, dan turut membawa pada lahirnya berbagai kelemahan yang berimplikasi pada lahirnya berbagai strategi masyarakat untuk menghadapi himbauan dan larangan pemerintah. Kehadiran pihak lain, seperti LSM dan media berperan sebagai shareholder yang kritis dalam menanggapi program-program pelestarian pemerintah. Sedikit kasus yang disampaikan dalam buku ini, semoga dapat memberikan gambaran betapa pentingnya posisi pemerintah, akademisi, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya pelestarian. Masing-masing pihak ingin berperan atau mengambil manfaat dari keberadaan warisan budaya di Trowulan dan dari sanalah kontestasi muncul, dan Trowulan menjadi arena bagi hadirnya berbagai macam relasi, negosiasi, dan konflik diantara pihak-pihak tersebut.

Kerjasama :



PMB-LIPI PT Gading Inti Prima



POLITIK EKONOMI PELESTARIAN WARISAN BUDAYA TROWULAN



POLITIK EKONOMI PELESTARIAN WARISAN BUDAYA TROWULAN

SUGIH BIANTORO
ENDANG TURMUDI

KATA PENGANTAR

Kegiatan penelitian “Kajian Politik Ekonomi Pengelolaan Cagar Budaya: Situs Banten Lama” merupakan salah satu kegiatan penelitian yang dilakukan di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB-LIPI) dan salah satu bagian dari kegiatan penelitian payung “Kajian Politik Ekonomi Pengelolaan Cagar Budaya” yang dilaksanakan selama tiga tahun (tahun 2012-2014).

Setelah pada tahun pertama (2012), hasil penelitian disusun dalam buku mengenai narasi pengelolaan cagar budaya, identifikasi *stakeholder* dalam pengelolaan cagar budaya, serta kebijakan yang terkait pengelolaan cagar budaya Kawasan Majapahit di Trowulan, pada buku tahun kedua ini tim memfokuskan pembahasan pada uraian dan analisis mengenai interaksi dan kontestasi *stakeholder* dalam pengelolaan kawasan cagar budaya kawasan Majapahit di Trowulan. Pembahasan kontestasi *stakeholder* ini sangat penting karena akan memberikan gambaran nyata dan jelas atas persoalan yang melingkupi pengelolaan suatu cagar budaya, khususnya pada tingkat lokal beserta implikasi yang mengikutinya pada satu pengelolaan.

Sebagai tahap akhir kegiatan penelitian, pada tahun ke-tiga (2014), seluruh hasil dari tahun pertama dan kedua akan menjadi sumber utama dalam penyusunan sintesa hasil penelitian “Kajian Politik Ekonomi Pengelolaan Cagar Budaya” dan formulasi rekomendasi kebijakan untuk pengelolaan cagar budaya di Indonesia.

Kami mengakui bahwa buku ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan atau kekeliruan namun besar harapan kami, buku ini dapat memberikan manfaat bagi khalayak luas, termasuk kalangan

akademisi, praktisi yang terkait dalam pengelolaan cagar budaya dan penyusun kebijakan.

Jakarta, Desember 2013
Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
Kebudayaan-LIPI

Ttd.

Dr. Endang Turmudi, MA

DAFTAR ISI

| | | |
|---|-----|-----------|
| KATA PENGANTAR | i | |
| DAFTAR ISI..... | iii | |
| BAB I | | |
| PENDAHULUAN | | 1 |
| 1.1 Warisan Budaya dan Pelestarian | 1 | |
| 1.2 Politik Ekonomi: Tinjauan Singkat | 5 | |
| 1.3 Politik Ekonomi: Warisan Budaya | 10 | |
| BAB 2 | | |
| UPAYA KONSERVASI TROWULAN | | 21 |
| 2.1 Minat Kolonial | 22 | |
| 2.2 Menjadi Urusan Negara | 29 | |
| 2.3 Warisan Budaya dan Gagasan Nasionalisme | 34 | |
| BAB 3 | | |
| POLITIK EKONOMI DALAM PELESTARIAN | | 41 |
| 3.1 Rencana Induk Arkeologi | 42 | |
| 3.2 Masyarakat Trowulan | 44 | |
| 3.3 Pusat Informasi Majapahit (PIM)..... | 48 | |
| BAB 4 | | |
| RUANG KONTESTASI..... | | 57 |
| 4.1 Komplek Ziarah Makam Troloyo | 58 | |
| 4.2 Siti Hinggil | 64 | |
| 4.3 Pura Majapahit Pak Suryo | 67 | |
| 4.4 Pabrik Baja | 70 | |
| 4.5 Para Pencinta Majapahit | 77 | |
| 4.6 Masyarakat Islam Santri | 85 | |

| | |
|----------------------|-----|
| BAB V | |
| P E N U T U P | 95 |
| DAFTAR PUSTAKA | 101 |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Warisan Budaya dan Pelestarian

Sebagai negeri yang kaya warisan budaya, Indonesia mungkin dianggap oleh masyarakat dunia sebagai negara yang sangat memperhatikan dan melaksanakan upaya-upaya pelestarian warisan budayanya. Akan tetapi, munculnya peringatan oleh lembaga internasional, seperti ancaman UNESCO untuk mencabut status Borobudur sebagai salah satu warisan dunia tahun 2011 dan penetapan oleh *World Monument Fund* (WMF) tahun 2013 terhadap situs Peninggalan Majapahit di Trowulan sebagai situs yang terancam, telah memunculkan kesan tentang tidak baiknya upaya-upaya pelestarian warisan budaya di Indonesia.

Berbagai program pelestarian memang telah dijalankan oleh pemerintah, yang sampai dengan tahun 2007 telah terinventarisasi hingga 7.374 situs, ditetapkan 400 situs, dipugarnya 422 situs, dan dilakukannya pemeliharaan 1.872 dan perlindungan 148 situs.¹ Meskipun demikian, program-program tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang hadir dalam masalah pemeliharaan warisan budaya yang ada. Bahkan belakangan ini, program pemerintah yang ada telah ikut memunculkan persoalan baru dalam kaitannya dengan pengembangan warisan budaya. Persoalan-persoalan yang

¹Dalam laporan Direktorat Peninggalan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata terlihat bahwa rekapitulasi data pelestarian situs/benda cagar budaya tidak bergerak di seluruh Indonesia sampai dengan Februari 2007.

muncul memang tidak selalu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat praktik di lapangan, melainkan bisa saja disebabkan oleh keterbatasan-keterbatasan kemampuan dalam (*intern*) negara, atau disebabkan oleh hadirnya faktor-faktor berpengaruh dari luar. Faktor intern biasanya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia atau kebijakan negara, dan kepentingan-kepentingan pihak tertentu dalam negara, sedangkan faktor luar bisa berbentuk respon pihak-pihak *non-state* terhadap program pemerintah.

Masalah warisan budaya biasanya hadir dalam bentuk dualitas antara kepentingan "*heritage*" dan ekonomi. Tidak sedikit, masalah pelestarian harus bersinggungan dengan kepentingan masyarakat, yang karenanya banyak program pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada kebutuhan mereka, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar warisan budaya. Masyarakat sekitar biasa menduga bahwa dalam program-program tertentu telah ada upaya keras pemerintah untuk memisahkan mereka dengan lingkungan, di mana warisan budaya itu berada. Dalam kasus tertentu, pemerintah lebih memberikan ruang bagi kelompok dunia usaha (*swasta*) daripada masyarakat untuk memanfaatkan warisan budaya yang ada. Dugaan ini muncul sebagai bentuk kekhawatiran masyarakat yang kebutuhan ekonominya memang bergantung dari keberadaan warisan budaya. Dugaan ini menciptakan kondisi yang dapat mengakumulasi sikap-sikap negatif dan memunculkan semacam keengganan masyarakat terhadap program negara, dan pada sisi lain mendorong mereka untuk membuat strategi-strategi politik agar mereka tetap ikut merasakan manfaat ekonomi dari warisan budaya yang ada.

Meskipun demikian, hal ini bukan berarti upaya pelestarian selalu gagal, karena beberapa program pelestarian warisan budaya oleh

negara telah membawa perubahan sesuai dengan kehendak masyarakat. Karenanya, upaya-upaya pelestarian warisan budaya hingga saat ini masih terus berlangsung, dan melalui bantuan para ahli dari kalangan akademisi selalu muncul rencana-rencana baru yang dianggap lebih baik. Hanya saja memang harus diakui bahwa persoalan-persoalan warisan budaya ini masih tetap sulit untuk dipecahkan terutama yang berkaitan dengan kemanfaatannya bagi masyarakat. Persoalan ini dapat muncul, karena dalam negara sendiri terdapat berbagai kalangan yang tidak selalu memiliki niat baik untuk benar-benar mengatur warisan budaya. Mereka itu kadang hanya memikirkan kepentingan tertentu, sehingga berpotensi mengganggu program-program kebijakan pelestarian, yang pada awalnya mungkin telah dirumuskan secara matang.

Pada sisi lain, kedudukan para ahli dari kalangan akademisi yang seharusnya membantu para birokrat untuk membuat rencana-rencana program pelestarian, lebih memilih untuk menghindari sikap-sikap yang kritis, sehingga mereka biasanya hanya menjadi alat untuk menjustifikasi kepentingan negara. Bahkan mereka juga biasa memanfaatkan kedekatan dengan negara sebagai cara untuk memuluskan kepentingan mereka yang jauh dari kaidah keilmuan. Memang diakui bahwa di antara mereka terdapat sebagian yang tetap bekerja dengan berdasarkan pada norma dan prinsip-prinsip keilmuan, merumuskan model pelestarian terbaik tanpa intervensi kepentingan politik. Tetapi cara seperti itu bisa menyebabkan mereka tidak dilibatkan kembali oleh negara. Kondisi seperti ini telah menyeret para akademisi untuk lebih cair apabila ingin menjadi bagian dari perumusan kebijakan program pelestarian, sehingga pemikiran mereka dapat mempengaruhi program-program tersebut.

Kurang berhasilnya program-program pelestarian warisan budaya oleh negara telah menyebabkan munculnya kelompok-kelompok yang mengklaim bertindak atas nama pelestarian. Mereka mendirikan semacam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tujuannya menyiratkan sebuah kepedulian terhadap warisan budaya dan keberadaan masyarakat. Para anggota LSM biasanya mengadvokasi masyarakat dan kadang berdiri dibelakang mereka ketika muncul konflik dengan negara dan dunia usaha dalam kaitannya dengan pelestarian. Meskipun demikian, cara kerja mereka sebenarnya tidak jauh berbeda dengan negara yang memberikan semacam jalan keluar dan alternatif-alternatif kepada masyarakat. Kesamaan yang lain adalah, beberapa LSM bekerja mewakili kepentingan tertentu, dan kadang idealisme mereka berubah ditengah jalan ketika mendapat tekanan-tekanan politik.

Tulisan ini ingin menggambarkan bagaimana sebuah program pelestarian warisan budaya berjalan secara kompleks, karena pengaturan tidak seluruhnya berada dalam jangkauan negara. Pelestarian warisan budaya ternyata melibatkan banyak *stakeholder* yang mewakili kepentingan masing-masing. Hasil penelitian kami di tahun pertama (2012) telah mengidentifikasi adanya beragam *stakeholder* pada upaya-upaya pelestarian warisan budaya di Trowula, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kompleksitas pelestarian warisan budaya yang ada memang cukup kental dengan nuansa politik dan ekonomi, di mana kewenangan seolah menyebar di antara para *stakeholder*. Dalam hal ini para *stakeholder* berupaya untuk mendapatkan sumber daya yang potensial di Kawasan Trowulan untuk kepentingan mereka.

Hasil penelitian tahun pertama mengidentifikasi terdapatnya 5 kelompok *stakeholder* di Trowulan, yaitu pemerintah,

masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan LSM. Masing-masing kelompok besar tersebut bukanlah entitas tunggal, karena mereka juga terdiri dari kelompok yang lebih kecil dengan kepentingan yang juga berbeda. Pemerintah, misalnya, bukanlah entitas tunggal yang sering dilihat oleh masyarakat sebagai kelompok yang patut dipersalahkan, ketika muncul kasus-kasus yang menyebabkan munculnya persoalan dalam pelestarian warisan budaya. Di kalangan pemerintah sendiri ternyata muncul pertentangan sengit antar birokratnya. Masing-masing kubu berdiri untuk kepentingan yang berbeda. Di antara mereka ada yang benar-benar peduli terhadap pelestarian warisan budaya, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, dan ada pula kubu yang hanya ingin memuluskan kepentingan politik dan ekonomi semata. Banyak aktor yang menjadi bagian dari pemerintah telah memainkan perannya secara baik dalam upaya mereka untuk pelestarian. Pada pihak lain, masyarakat juga bukanlah entitas yang tunggal melainkan terdiri dari beragam kelompok kepentingan.

Pada tahun kedua ini (2013), pembahasan diarahkan pada persoalan substansi politik-ekonomi yang berlangsung di Kawasan Trowulan. Politik-ekonomi yang dimaksud berfokus pada bagaimana kekuasaan dan sumber daya didistribusikan dan diperebutkan oleh masing-masing *stakeholder* dalam konteks yang berbeda, dan implikasinya untuk hasil-hasil pembangunan kebudayaan. Strategi dan relasi antar *stakeholder* menjadi salah satu pembahasan yang tersirat dalam kasus-kasus pelestarian yang berlangsung di Kawasan Trowulan.

1.2. Politik-Ekonomi: Tinjauan Singkat

Persoalan politik ekonomi pelestarian warisan budaya di Indonesia bukanlah subjek kajian yang mudah. Para peneliti

menyadari adanya keterbatasan-keterbatasan yang sudah mulai dirasakan saat awal penelitian ini berlangsung. Menduduki posisi sebagai bagian dari negara adalah masalah tersendiri, yang mau tidak mau harus menjadi pertimbangan dalam upaya mengkonstruksi teks berdasarkan data-data di lapangan. Tulisan ini belum memberikan solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah, melainkan hanya menggambarkan bahwa proses politik-ekonomi adalah aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun rancangan kebijakan program pelestarian warisan budaya di Indonesia. Tulisan ini diharapkan dapat mendorong pemikiran para *stakeholder* yang jauh lebih kritis dan efektif untuk menciptakan sebuah model pelestarian warisan budaya yang bisa diterima oleh semua pihak. Kami menaruh harapan agar penelitian di tahun ketiga ini akan dapat memberikan solusi yang konkret untuk pembuat kebijakan dalam membangun strategi pelestarian cagar budaya di Indonesia.

Secara umum, analisis politik-ekonomi berfokus pada bagaimana kekuasaan dan sumber daya didistribusikan dan diperebutkan oleh berbagai *stakeholder* dan apa implikasinya bagi pembangunan pada umumnya. Dalam kajian tertentu, analisis politik-ekonomi membantu menjelaskan apa kepentingan dasar para *stakeholder* dan apa kebijakan pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Analisis politik-ekonomi memang bukanlah cara terbaik untuk resolusi masalah pembangunan, namun ia dapat mengarahkan lebih efektif dan layak secara politis terhadap strategi pembangunan yang harus dibentangkan, serta menginformasikan apa yang lebih realistis dapat dicapai, dan apa resiko yang harus ditanggung. Selain itu, ia juga dapat memberikan kontribusi untuk dicapainya hasil yang lebih baik dengan mengidentifikasi di mana peluang dan hambatan utama untuk reformasi kebijakan. Pemahaman ini sangat relevan di

lingkungan yang rentan dan terkena dampak konflik di mana tantangan membangun negara dan masyarakat damai dan sejahtera sangat sarat dengan muatan politis.

Politik-ekonomi berhubungan dengan interaksi politik dan proses ekonomi dalam sistem negara dan masyarakat. Ia juga berkaitan dengan distribusi kekuasaan dan kekayaan antara kelompok dan individu yang berbeda, serta proses menciptakan, mempertahankan dan mengubah hubungan kekuasaan dari waktu ke waktu. Dengan pengertian seperti ini, analisis politik ekonomi memberikan perhatian khusus terhadap politik, yang dipahami dalam kerangka kontestasi dan tawar-menawar antara kelompok-kelompok kepentingan (*stakeholder*) melalui klaim-klaim mereka atas penguasaan sumber daya yang ada. Selain itu, analisis ini berkaitan dengan proses ekonomi yang menghasilkan kekayaan dan berkaitan dengan bagaimana pilihan politik dibuat. Pada kenyataannya, kedua proses tersebut saling erat berkaitan dan merupakan bagian dari rangkaian dinamika terpadu yang mempengaruhi hasil-hasil pembangunan. Analisa politik-ekonomi sangat berguna bagi para praktisi pembangunan karena membantu kita untuk memahami apa yang mendorong munculnya perilaku politik tertentu, bagaimana bentuk kebijakan tertentu dan program turunannya, dan siapakah yang menjadi "pemenang" dan "yang kalah", serta apa implikasinya bagi strategi pengembangan program-program.

Secara khusus, analisis politik-ekonomi berhubungan dengan tiga aspek. Pertama, analisis ini diarahkan untuk memahami kepentingan yang dihadapi kelompok-kelompok yang berbeda terutama elit politik, dan bagaimana dialog kepentingan tadi menghasilkan kebijakan tertentu yang dapat mendorong atau menghambat pembangunan. Kedua, analisis ini melihat lembaga-lembaga formal dan informal serta berupaya memahami norma-

norma sosial, politik dan budaya dalam membentuk interaksi manusia dan persaingan politik serta ekonomi mereka. Ketiga, analisis ini menilai dampak dari nilai-nilai dan ide-ide, termasuk ideologi politik, agama dan keyakinan budaya terhadap perilaku politik dan kebijakan publik. Melalui cara ini, analisis politik-ekonomi membantu kita untuk memahami bagaimana lembaga yang ada telah membentuk ide-ide dan mendorong tindakan politik dan pembangunan.

Analisis politik-ekonomi dapat dibedakan ke dalam tiga bagian, yaitu analisis di tingkat makro atau negara, tingkat sektor dan tingkat program. Analisis di tingkat makro bertujuan untuk memahami lingkungan politik-ekonomi yang lebih luas pada konteks negara. Hal ini dapat berguna untuk menginformasikan proses perencanaan negara dan strategi yang akan diterapkannya secara keseluruhan. Dalam tingkat ini, terdapat interaksi yang dinamis di antara tiga faktor, yaitu struktur, lembaga, dan agen. *Struktur* didefinisikan sebagai faktor-faktor kontekstual jangka panjang. Pada umumnya, struktur ini tidak mudah untuk dipengaruhi. Dalam hal ini ia berupa kondisi geografi, kekayaan sumber daya alam, pergeseran demografi, perubahan iklim dan kemajuan teknologi. Sementara itu, *Lembaga* dapat bersifat formal, seperti aturan konstitusi dan hukum, dan dapat pula bersifat informal dalam arti norma-norma politik, sosial dan budaya. Dalam kasus tertentu, muncul ketegangan antara aturan formal dan praktek kekuasaan informal. *Agen*, pada sisi lain, adalah para aktor, seperti pemimpin politik, partai politik, pengusaha, serikat pekerja, LSM dan lain-lain, termasuk yang berasal dari luar, seperti pemerintah asing, organisasi-organisasi regional, lembaga donor dan perusahaan multinasional.

Kedua, adalah analisis tingkat sektor, yang bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan kesempatan dalam sektor-sektor

tertentu. Setelah *stakeholder* ini diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi para aktor yang paling berpengaruh, apa kepentingan dan insentif mereka, dan bagaimana mereka berdinamika di keseluruhan sektor, termasuk dalam pengusulan reformasi kebijakan. Beberapa persoalan yang termasuk dalam analisis ini adalah, misalnya tentang “peran”, yakni untuk mengetahui siapa saja pemangku kepentingan utama yang bermain pada sektor tertentu. Dalam analisis ini dilihat peran-peran dari pemain yang berbeda, dan apakah ada keseimbangan antara pusat dan daerah. Lebih lanjut analisis ini akan melihat “hubungan kekuasaan”, yakni tentang sejauh mana kekuasaan yang diberikan di tangan individu-individu atau kelompok tertentu itu berinteraksi dan bagaimana kelompok kepentingan yang berbeda di luar pemerintahan (misalnya sektor swasta, LSM, media) berusaha untuk mempengaruhi kebijakan.

Ketiga, adalah analisis di tingkat program yang diarahkan untuk memahami dan menyelesaikan masalah tertentu dalam program yang dicanangkan, atau dalam kaitannya dengan isu kebijakan tertentu. Analisis politik-ekonomi juga dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan menyelesaikan masalah tertentu di tingkat proyek, atau dalam kaitannya dengan masalah kebijakan, yang dapat melintasi sejumlah sektor. Kerangka kerja ini dapat mendorong pengguna untuk mengidentifikasi masalah, isu atau kerentanan yang harus ditangani dan memetakan kelemahan kelembagaan dan tata kelola yang mendukung permasalahan tersebut.²

²DFID. *Political Economy Analysis How To Note*. A DFID Practice Paper, July 2009.

1.3. Politik Ekonomi Warisan Budaya

Kebijakan program-program pelestarian warisan budaya telah dilakukan sejak masa kolonial. Pada awalnya, komunitas-komunitas pecinta barang antik menjadi agen pemrakarsa konsep pelestarian saat itu. Pada perkembangannya, muncul satu periode di mana kemudian urusan warisan budaya diambil alih oleh negara, yang kemudian membentuk sebuah lembaga kebudayaan. Urusan warisan budaya ini telah diatur oleh hukum yang dibuat kemudian oleh pemerintah, yang menjadikan negara sebagai satu-satunya pihak yang bertanggungjawab penuh atas pelestarian warisan budaya tadi. Persoalan kemudian muncul ketika terjadi keterbatasan-keterbatasan dalam hal upaya pelestarian warisan budaya ini, termasuk yang dialami oleh pemerintah, seperti karena hadirnya kepentingan kapitalisme dan kepentingan berkembangnya industrialisasi. Dengan demikian, perhatian pemerintah, secara tidak langsung, diarahkan kepada upaya-upaya menyelesaikan keterbatasan-keterbatasan tersebut dan agak memalingkan upaya pelestarian warisan budaya yang ada.

Meskipun demikian, masalah warisan budaya itu tetap saja menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan. Pelestarian warisan budaya dengan tujuan-tujuan ideologis menjadi ciri utama kepentingan negara. Berbagai program pelestarian telah diterapkan pada beberapa warisan budaya, yang sepertinya telah dipilih oleh negara secara terukur dan representatif dengan melihat nilai pentingnya. Sayangnya, tidak semua program-program tersebut mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan. Bahkan, program-program pelestarian yang pada dasarnya dirancang agar bermanfaat bagi "*heritage*" dan masyarakat lokal, malah menimbulkan persoalan karena program-program tersebut tidak memberikan apa yang yang

diinginkan oleh masyarakat lokal. Kondisi ini diduga karena di dalam negara itu sendiri terdapat banyak kepentingan, yang memunculkan pertentangan intern di antara kalangan mereka sendiri. Pada masa kolonial, selain demi kepentingan pelestarian yang bersifat ideologis, program-program pemerintah telah menyiratkan kepentingan lain yang cenderung tidak nampak, yang menurut sebagian para ahli merupakan alasan mengapa program-program itu dibuat.

Benedict Anderson (2001) mengemukakan adanya tiga faktor penyebab munculnya masalah seperti itu. *Pertama* adanya tumpang tindih antara perhatian arkeologis dengan pergulatan politis terutama pada kebijakan pendidikan negara. Konservasi arkeologis dipandang sebagai program konservatif untuk menjadikan kaum pribumi tetap pribumi. *Kedua*, program ideologis formal rekonstruksi itu senantiasa menempatkan para pembangun monumen kuno berbeda ras dengan penduduk pribumi. *Ketiga*, negara kolonial dianggap paling pantas sebagai penjaga tradisiinggalan-tinggalan kuno tersebut, karena mereka menganggap pribumi tidak mampu meneruskan peradaban tinggi tersebut. Mereka menganggap masyarakat pribumi terbelakang dan miskin, sehingga yang paling pantas untuk menjaga warisan budaya tersebut adalah para kolonial, yang merasa memiliki peradaban tinggi.³

Dengan mengambil sudut pandang yang berbeda dengan Anderson, diduga bahwa negara bukanlah suatu agen yang “tunggal”, karena di sana terdapat beragam aktor politis yang menjalankan program-program pelestarian dengan tujuan yang berbeda-beda. Di sana terdapat orang yang mungkin

³Benedict Anderson. 2001. *Imagined Communities*. Yogyakarta: Insist Press, hlm. 276-278.

berkonspirasi dan ada pula yang menjalankan praktek-praktek politis dengan dasar kepentingan ideologis dan tetap berjuang dengan klaim pelestarian. Dengan kata lain, di sana terdapat mereka yang membuat program kebijakan yang tepat untuk pelestarian warisan budaya, dan sebaliknya ada pula birokrat lain yang dengan jabatan tingginya menggunakan wewenangnya untuk membuat program pelestarian yang akan menguntungkan kepentingan politik dan ekonomi mereka.

Hal yang sama juga terjadi dalam masyarakat, di mana warisan budaya merupakan bagian dari lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi mereka. Berkaitan dengan pembatasan oleh negara secara lebih “ketat” tentang pemanfaatan warisan budaya, mereka sebenarnya telah memahami sekali tentang bagaimana menjadikan warisan budaya sebagai komoditas. Banyaknya variasi, baik pada birokrat negara maupun masyarakat, telah memunculkan banyak klaim dan persaingan yang berlangsung untuk memperebutkan hak pemilikan warisan budaya, sehingga anggota masyarakat yang ingin ikut ngurusi cagar budaya juga dapat dikatakan tidak tunggal. Kekuasaan dalam mengatur atau memperebutkan warisan budaya ini tersebar di antara aktor-aktor elit lokal, yang masing-masing mengambil peran untuk membentuk suatu sistem kepemilikan warisan budaya yang biasanya tidak sejalan dengan pemahaman negara.

Dampaknya adalah bahwa masyarakat merasa terusik atas hak kepemilikannya ketika negara hadir untuk mengambil alih pengaturan warisan budaya yang ada. Program-program pelestarian oleh negara dirasakan kurang memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi karena pembatasan negara dalam praktek-praktek pemanfaatan warisan budaya telah didasari oleh hukum, kekuasaan yang dimilikinya jelas jauh lebih besar daripada aturan yang dibuat oleh masyarakat. Dengan

kondisi seperti ini, apa yang dilakukan oleh masyarakat adalah mempengaruhi kebijakan negara melalui relasi-relasi kekuasaan yang dipunyainya untuk membagi hak-hak kepemilikan warisan budaya dengan lebih merata. Sayangnya, hanya segelintir elit lokal yang kemudian mampu merasakan hasilnya.

Dalam merumuskan suatu program pelestarian, pemerintah memang tidak sendiri karena biasanya dibantu oleh para ahli dari kelompok akademisi yang berasal dari luar birokrasi. Dalam banyak kasus, keberadaan para ahli ini menyiratkan hadirnya sebuah *power of knowledge* yang besar untuk menyusun atau memperbaiki program-program pemerintah yang tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Statemen-statement mereka terlihat “ampuh” untuk digunakan oleh pemerintah dalam menjustifikasi sebuah rencana program pelestarian. Tetapi, para ahli itu tidak selamanya memiliki kesamaan persepsi dalam memberikan model pelestarian warisan budaya. Beberapa ahli telah mengarahkan pemikirannya sejalan dengan kepentingan negara, sehingga program-program yang berhasil dirumuskannya sudah tidak bebas nilai lagi dan penuh dengan kepentingan politik. Meskipun demikian, banyak juga para ahli yang memposisikan dirinya sebagai kelompok kritis dalam memandang program-program pelestarian warisan budaya oleh negara. Bahkan sebagian menjadi pemrakarsa lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan membantu mereka yang merasa dirugikan oleh program-program pelestarian yang tengah berlangsung.

Kurang efektifnya program-program pelestarian pemerintah, dapat saja terjadi ketika para perancang dan pelaksananya terlalu menyederhanakan persoalan di lapangan. Tania Murray Li (2012) menjelaskan bahwa terdapat dua praktik pokok yang diperlukan untuk menerjemahkan pengaturan menjadi program-

program yang eksplisit. *Pertama* problematisasi, yaitu langkah pengenalan berbagai kekurangan yang perlu dibenahi. *Kedua* adalah teknikalisisi permasalahan, yaitu serangkaian praktik yang menampilkan urusan yang hendak diatur sebagai suatu ranah yang mudah dimengerti, tegas cakupannya, jelas ciri-cirinya dan mengembangkan teknik untuk menggerakkan kekuatan serta unsur-unsur yang telah ditampilkan tadi.⁴ Dari konsep yang kedua tentang teknikalisisi permasalahan, kami menangkap bahwa pemerintah cenderung menyederhanakan persoalan-persoalan yang berkembang kompleks dalam masalah warisan budayanya. Dalam konteks ini, pemerintah cenderung lebih memilih untuk melibatkan para ahli yang dapat sejalan dengan pemikiran-pemikiran mereka. Teknikalisisi permasalahan ini dapat menjadi awal dari penegas kepakaran dan memisahkan para ahli dan pemerintah, sebagai pihak yang memiliki kemampuan untuk menganalisa persoalan, dari masyarakat sebagai objek yang tidak mengerti apa-apa. Seperti biasa terjadi dalam berbagai kasus pelestarian warisan budaya, masyarakat tidak mendapatkan ruang lebih dalam rancangan program yang ada, dan sebaliknya mereka malah ditempatkan sebagai agen perusak cagar budaya yang harus diatur sedemikian rupa.

Dalam teknikalisisi permasalahan, segala urusan tentang warisan budaya seharusnya dilucuti dulu aspek-aspek politiknya menjadi gejala non-politis. Para ahli dari kalangan pemerintah atau akademisi yang dilibatkan dalam proyek-proyek pemerintah harus dilatih untuk menerjemahkan berbagai persoalan politis menjadi masalah teknis yang dapat diperbaiki melalui intervensi

⁴Tania Murray Li. 2012, hlm. 13. Ia meminjam istilah Rose dalam *Power of Freedom* tentang penerjemahan teknis atau mentekniskan (*rendering technical*).

pembangunan.⁵ Tapi dalam kenyataan lapangan kami melihat adanya dimensi dari program-program pelestarian yang sepertinya dirancang sebagai langkah untuk mempertahankan kekuasaan. Beberapa kasus tentang program pembangunan di Sulawesi Tengah, seperti diungkap oleh Tania, memang tidak dilaksanakan semata-mata untuk memelihara dominasi kelas tertentu. Namun, dalam kasus warisan budaya, di sana terdapat program yang cenderung dirancang untuk tujuan politis tertentu, sehingga kita memiliki alasan kuat untuk meragukan sejumlah klaim yang dibuat atas nama pelestarian. Walaupun bukan menjadi bahasan dalam tulisan ini, kasus Gunung Padang yang akhir-akhir ini menjadi persoalan dalam pelestarian warisan budaya mungkin dapat mewakili pemikiran tersebut. Meskipun demikian harus menjadi catatan bahwa sikap yang mencurigai adanya niat tersembunyi untuk mengejar keuntungan sepihak atau dominasi tertentu dalam kasus-kasus pelestarian cagar budaya hanya akan mempersempit ruang analisa⁶ bisa dilakukan

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah adanya perbedaan dalam memahami apa yang disebut sebagai warisan budaya. Dalam tulisan ini apa yang menjadi fokus pembahasan adalah apa yang berkaitan dengan warisan budaya yang bersifat kebendaan (*tangible*) seperti cagar budaya. Arah seperti ini memang telah dipersiapkan, di samping ia juga didukung oleh instrumen negara tentang peraturan warisan budaya yang memang lebih merujuk pada yang *tangible* daripada *intangible*. Kecenderungan ini telah terjadi sejak adanya *Monumenten Ordonnantie* Nomor 21 Tahun 1934 (*Staatsblad* Tahun 1934 Nomor 515) pada masa kolonial, di mana hingga saat ini pengaturannya berada di bawah UU No. 11 Tahun 2010 tentang

⁵Tania Murray Li. 2012, hlm. 14.

⁶Tania Murray Li. 2012, hlm. 14.

Cagar Budaya. Dalam hal ini negara saat ini mengartikan cagar budaya sebagai warisan budaya yang bersifat kebendaan atau berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.⁷

Pengertian seperti itu bukan hanya mempunyai keterbatasan tetapi juga mengingkari perkembangan dalam pemahaman masyarakat. Beberapa kasus yang terjadi di Trowulan memperlihatkan bahwa konteks politik-ekonomi yang melekat pada warisan budaya dimulai oleh klaim akan adanya nilai-nilai spiritual yang melekat dalam cagar budaya. Benda cagar budaya biasa dianggap oleh sebagian pemimpin bangsa sebagai alat keseimbangan antara tanggung jawab sebagai seorang pemimpin dengan kekuasaannya dan sebagai makhluk yang spritual. Dalam konteks ini, cagar budaya sebagai ruang spritual perlu dijaga nilai-nilainya dengan cara pelestarian. Konsekuensinya, para birokrat bawahan, sebagai bagian dari negara, segera menerjemahkan kemauan dari pemimpin mereka tersebut dalam bentuk program-program melalui klaim pelestarian. Inisiatif para birokrat tersebut untuk memenuhi keinginan atasannya dapat terjadi secara sadar karena mereka juga memiliki kepentingan tertentu, sementara itu mereka tidak menyadari bahwa atasan mereka menjalankan kekuasaan dengan maksud tertentu pula yang bisa jadi berbeda dari maksud pelestarian. Kekuasaan itu bersifat subjektif, yang karenanya akan ditanamkan kepada orang yang jadi bawahannya secara persuasif. Dengan kata lain, di sana selalu ada pengkondisian yang bahkan dimaksudkan secara eksplisit agar ada kesediaan orang lain untuk memenuhi permintaan sang atasan. Meskipun demikian, bisa saja

⁷Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

penerimaan oleh bawahan itu memang sudah menjadi bagian dari budaya, di mana sikap tunduk itu dipandang sebagai normal, tepat dan benar menurut tradisi. Penerapan kekuasaan yang membuat orang lain yang ada dalam sistem tunduk, dijalankan bukan sekadar lewat adanya pilihan-pilihan yang dibuat individu tapi juga lewat perilaku kelompok yang terstruktur secara sosial dan budaya dan lewat praktik-praktik institusi, yang memang bisa muncul dalam bentuk keengganan orang untuk bertindak atau untuk menentang kekuasaan.⁸

Walaupun dilakukan secara tidak sadar dan terkait struktur tertentu, mereka sebenarnya mampu mengenali keadaan untuk memanfaatkan kepentingan –dan bukan kebutuhan- tertentu yang menjadi bagian dari rancangan program-program pelestarian. Pada tingkatan inilah, persoalan semakin kompleks karena muncul aktor-aktor kepentingan yang notabene adalah bagian dari negara. Di sisi lain, para ahli bermain melalui *knowledge capital* untuk memberikan cara terbaik yang harus dilakukan oleh pemerintah. Keduanya (birokrat dan para ahli) dapat seiring sejalan atau sebaliknya, dan karena kekuasaan ada di tangan negara maka mereka yang dapat menyesuaikan dengan kepentingan birokrat lah yang dapat terlibat, sedangkan yang berada pada posisi kritis akan berjuang melalui media untuk membentuk opini tertentu sebagai oposisi terhadap program pemerintah yang dianggap menjauh dari tujuan pelestarian. Biasanya, suatu program yang dipaksakan akan menimbulkan persoalan baru yang membuat arah dari tujuan awal menyimpang jauh karena harus menghadapi permasalahan atau hambatan. Dampak dari program yang seperti ini adalah lahirnya posisi-posisi baru yang diisi oleh mereka yang ingin memanfaatkan

⁸James A. Caporaso dan Davis P. Levine. 2008. *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm. 424-438.

keadaan, dan mereka ini dapat menjadi bagian dari pihak yang pro dengan pemerintah atau sebaliknya. Hubungan antara para *stakeholder* ini, yakni antara para ahli dan birokrat, media, masyarakat, LSM, dan lainnya telah membangun sebuah kontestasi dalam wilayah pelestarian cagar budaya.

Analisa atas bentuk-bentuk kontestasi dapat membantu dalam memahami cara-cara tentang bagaimana mereka yang berada pada posisi-posisi kritis terhadap pemerintah berhadapan dengan program-program pemerintah. Kontestasi adalah “*the action or process of disputing or arguing*”. Kontestasi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah hal yang intrinsik dan menjadi bagian yang tak terelakkan dari sebuah sistem pelestarian cagar budaya. Kontestasi itu sendiri mencakup pertentangan dalam semua dimensi warisan budaya, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan serta pengelolaan dan dualitas kepentingan antara warisan budaya sebagai identitas atau komoditas.⁹

Olsen dan Timothy (2002) menguraikan tiga tipe kontestasi. *Pertama*, kontestasi berkaitan dengan perbedaan klaim kelompok-kelompok sosial berbeda terhadap tempat, even, dan artefak warisan budaya yang sama. Contohnya, suatu kelompok (*stakeholder*) memahami warisan budaya dan bahkan mungkin menggantikan seluruhnya dengan warisan budaya lain yang terjadi dalam suatu zaman. Banyak kasus terjadi bahwa masing-masing kelompok mengklaim kebenaran objektif suatu masa lalu. *Kedua*, kontestasi yang muncul ketika warisan budaya diinterpretasi dan digunakan secara berbeda oleh bagian-bagian yang berbeda dalam suatu kelompok, misalnya kelompok keagamaan. *Ketiga* adalah kontestasi yang terjadi dalam konteks

⁹Tolina Loulanski. 2006. “Revising the Concept for Cultural Heritage: The Argument for a Functional Approach” dalam *International Journal of Cultural Property* 13, hlm. 207–233.

masa lalu ketika suatu kejadian sejarah dipahami berbeda meskipun terjadi pada tempat dan waktu yang sama.¹⁰

Kontestasi yang berlangsung di Kawasan Trowulan diduga merupakan akibat dari kurang efektifnya program-program pelestarian pemerintah. Kontestasi ini berlangsung sebagai dampak dari distribusi kekuasaan berkaitan dengan kepemilikan hak atas warisan budaya yang ada. Para *stakeholder*, baik pemerintah, masyarakat, akademisi, dan swasta membangun sebuah strategi politik untuk tetap berada pada suatu posisi yang menguntungkan dalam memanfaatkan warisan budaya demi melanggengkan kepentingan masing-masing. Relasi-relasi kekuasaan dibangun sedemikian rupa, dan secara tidak sadar membangun sebuah sistem yang menampilkan kelompok-kelompok yang lebih dominan daripada yang lain yang kemudian memunculkan kontestasi yang bahkan tidak sehat.

¹⁰Dallen J Timothy dan Gyan P. Nyaupane (ed). 2009. *Cultural Heritage and Tourism in the Developing World: A Regional Perspective*. London and New York: Routledge, hlm. 42. Tania Muray Li dalam artikelnya yang berjudul “*Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot*” membahas bagaimana masyarakat di Sulawesi tengah mencari sebuah kebenaran sejarah untuk mengartikulasikan diri mereka yang terpinggirkan dalam proses pembangunan. Sejarah dibangkitkan kembali menjadi sebuah identitas yang selama ini terpendam. Sejarah kembali dikonstruksi sebagai alat perjuangan ditengah-tengah ketidakadilan penguasa. Lihat Tania Murray Li. 2000. *Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot*. *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 42, No. 1. (Januari, 2000), hlm. 149-179.

BAB 2

UPAYA KONSERVASI TROWULAN

Bab ini akan menjelaskan upaya pelestarian di Trowulan sejak masa kolonial hingga periode menjelang kemerdekaan Indonesia. Perhatian terhadap Trowulan telah dimulai ketika Raffles meminta Wardenaar untuk meninjau Trowulan dan meneliti objek situs tersebut. Perhatian terhadap Trowulan meningkat lebih besar setelah Negarakratagama berhasil ditemukan oleh Dr. Brandes di Lombok dan diterjemahkan oleh beberapa ahli kolonial. Interpretasi terhadap naskah tersebut memunculkan dugaan tentang adanya hubungan antara naskah tersebut dengan tinggalan fisik di Trowulan. Dari interpretasi terhadap Negarakratagama lah kemudian muncul kesimpulan bahwa Trowulan adalah bekas sebuah kota yang ada pada masa Majahapit. Apa yang penting dari ditemukannya Negarakratagama adalah bahwa naskah ini mengilhami para tokoh pergerakan di kemudian hari dalam merumuskan negara Indonesia yang hendak mereka bangun.

Sejarah pelestarian warisan budaya memang telah dimulai sejak masa kolonial dengan segala kepentingan Belanda dalam melaksanakan kolonialismenya. Sejauh mana kompleksitas kepentingan itu melekat dalam program-program pelestarian yang dirumuskan oleh pemerintah kolonial akan digambarkan dalam bab ini. Hal yang sama juga akan dilihat ketika masalah pelestarian ini terjadi di masa kemerdekaan dan sebelumnya, di mana pemaknaan cagar budaya lebih syarat dengan kepentingan politik ekonomi.

2.1. Minat Kolonial

Konsep pelestarian telah dicetuskan lebih dari seratus tahun yang lalu, ketika William Morris mendirikan Lembaga Pelestarian Bangunan Kuno pada tahun 1877. Jauh sebelum itu, sekitar tahun 1700, Vanburgh seorang arsitek Istana Bleinheim Inggris, sebenarnya telah merumuskan konsep pelestarian meskipun konsep itu belum mempunyai kekuatan hukum. Pelestarian atau konservasi berasal dari kata *conservation* yang terdiri atas kata *con* (*together*) dan *servare* (*keep/save*) yang memiliki arti sebagai upaya memelihara apa yang kita punya (*keep/save what you have*) dengan cara bijaksana (*wise use*). Ide ini dikemukakan oleh Theodore Roosevelt (1902) yang merupakan orang Amerika pertama yang mengemukakan tentang konsep konservasi.¹¹

Pada awalnya konsep pelestarian hanya terbatas pada lingkup monumen yang lazim disebut preservasi. Konsep tersebut diimplementasikan dengan mengembalikan monumen seperti keadaan semula. Namun dari berbagai kasus yang terjadi, konservasi ternyata tidak hanya ditujukan untuk perlindungan “*heritage*” saja karena terdapatnya kepentingan lain yang melekat di dalamnya. Sejak masa kolonial hingga saat ini, pemerintah memiliki peran terbesar dalam pelestarian cagar budaya. Hal ini tertera dalam aturan hukum yang ada pada periode tersebut, yaitu *Monumenten Ordonnantie* Nomor 21 Tahun 1934 (*Staatsblad* Tahun 1934 Nomor 515) dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (setelah Indonesia merdeka) yang menyiratkan bahwa pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas pelestarian cagar

¹¹Siswanto. 2012. “Menuju Konservasi Karst dan Situs-situs Arkeologinya, Kasus di Gunung Kidul Yogyakarta” dalam M. Irfan Mahmud dan Zubair Mas’ud (ed.). *Warisan Sumberdaya Arkeologi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Balai Arkeologi Jayapura dan Penerbit Ombak, hlm. 80.

budaya. Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai pengganti undang-undang yang lama, memang menyebutkan tentang peran masyarakat, walaupun pada prakteknya, pemerintah tetap memegang kendali di antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Situasi ini memperlihatkan bahwa pengaturan cagar budaya tidak dapat dilepaskan dari kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Mereka adalah pihak yang merasa paling mengetahui persoalan di lapangan. Melalui berbagai program intervensi, pemerintah merasa yakin - bahkan cenderung utopis – bahwa ia dapat melakukan pengaturan secara tepat dan mensejahterakan masyarakatnya. Walaupun demikian, tidak semuanya dikatakan berhasil, karena sebagian besar program-program pemerintah yang disusun secara rapihpun malah memposisikan masyarakat sebagai pihak yang dirugikan dan sebaliknya menguntungkan pihak lain, termasuk pemerintah sendiri.

Minat terhadap warisan budaya di Indonesia sudah muncul sejak masa kolonial awal abad ke-18, ketika beberapa orang Eropa mulai menaruh perhatian pada artefak dan bangunan kuno. Mereka terdiri dari individu atau komunitas dengan latar belakang berbeda, dengan jumlah mayoritasnya adalah naturalis dan pejabat pemerintah. G.E. Rumphius, seorang ahli botani dan zoologi, dianggap sebagai salah satu ahli pemrakarsa minat penelitian warisan budaya di Indonesia. Pada tahun 1705, Rumphuis menerbitkan buku berjudul “*D’Amboinsche Rariteitkamer*” yang membahas tentang benda-benda peninggalan kuno dan mitos dibalik benda-benda tersebut.¹²

¹²Daud A. Tanudirjo. 1995. “Theoretical trends in Indonesian archaeology” dalam Peter J. Ucko (ed.), *Theory In Archaeology: A World Perspective*. London: Routledge, hlm. 63.

Konsepsi orang Eropa mengenai benda budaya cenderung berbeda dibandingkan dengan masyarakat Jawa. Dalam masyarakat kuno, seperti Pasundan, Jawa, dan Bali, penghargaan terhadap benda budaya tidak didasari keindahan estetis atau kekunoannya tetapi atas dasar kesaktiannya. Sebuah benda yang tidak bernilai estetis dapat dianggap luar biasa jika benda tersebut konon pernah dimiliki oleh seorang pahlawan atau menjadi bagian dari perangkat suatu kerajaan. Karenanya, benda-benda yang diyakini memiliki kesaktian akan diperlakukan dengan sangat hormat. Makna hakiki pusaka itu artinya berasal dari masa lalu yang terkadang sangat kuno dan bertahan hingga kini.¹³ Sering terjadi suatu benda dianggap berharga oleh orang Eropa karena sarat dengan makna historis, padahal benda tersebut dianggap tidak berarti sama sekali oleh banyak orang Indonesia. Keramik Cina yang dicari oleh kolektor Eropa, menjelang akhir 1960-an, misalnya, dipergunakan oleh Orang Jawa, Bali dan Sumatera sebagai barang pecah belah sehari-hari yang biasa saja, dan pengaruh Hindu Jawa atau lainnya memang sama sekali tidak menarik minat masyarakat yang telah di-Islamkan. Begitu pula dengan bangunan-bangunan VOC tampak seperti tidak bernilai bagi para pejabat negara Indonesia, dan kadang-kadang mereka bahkan memerintahkan untuk menghancurkannya.¹⁴

Karena tidak mengenal lagi pengertian pusaka, orang Eropa, terutama sejak awal abad ke-19 memasukkan konsepsi mereka sendiri mengenai benda budaya, atas dasar pertimbangan usia, ditambah kriteria kehalusan. Sejak orang Belanda mengirimkan koleksi arca Indonesia yang pertama ke Eropa dan pada saat yang sama memperkenalkan pengertian museum di Hindia, banyak

¹³Denys Lombard. 2005. *Nusa Jawa: Silang Budaya 1, Batas-Batas Pembaratan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 212.

¹⁴Denys Lombard. 2005, hlm. 212.

peminat benda-benda kuno dan antik tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkoleksian di Indonesia. Sejak abad ke-17, kapak perunggu dari zaman protosejarah dipajang di Ruang Benda Langka di Museum Rumphuis di Ambon, dan pada tahun 1733 Coyett telah memboyong beberapa arca dari Jawa Tengah yang dipajang dikediamannya di Batavia.¹⁵ Hingga pada tahun 1778, berdiri organisasi peminat dan peneliti benda seni dan antik yang bernama “*Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*”.¹⁶ Usaha organisasi ini diantaranya mengumpulkan koleksi arkeologis, mata uang, dan naskah. Setelah diperkaya selama abad ke-19 dan ke-20, dan ditambah dengan ruang etnografi, berbagai koleksi itu kini merupakan khazanah Museum Nasional Jakarta, museum yang terkaya di seluruh Asia Tenggara.¹⁷

Perhatian terhadap sisa-sisa peninggalan kuno meningkat sejak munculnya pemerintahan Letnan Gubernur Jenderal Inggris, Sir Thomas Stamford Raffles pada 1811-1816. Ia sendiri tergolong pejabat yang memiliki minat besar terhadap kebudayaan dan masyarakat Jawa. Walaupun tergolong singkat dalam menduduki jabatannya sebagai penguasa tertinggi Inggris di Jawa, Raffles telah menghasilkan karya monumental yang berjudul “*The History of Java*” (1817), yakni sebuah karya komprehensif tentang sejarah dan kebudayaan Jawa. Karya Raffles yang ditulisnya di Inggris itu dalam banyak hal adalah karya yang mengesankan, karena karya ini jauh lebih mudah dibaca dan ditulis dengan lebih baik daripada tulisan para pendahulunya.

¹⁵Denys Lombard. 2005, hlm. 212.

¹⁶Daud A. Tanudirjo. 1995. “Theoretical trends in Indonesian archaeology” dalam Peter J. Ucko (ed.), *Theory In Archaeology: A World Perspective*. London: Routledge, hlm. 63.

¹⁷Denys Lombard. 2005, hlm. 212-213.

Selain itu, apa yang juga penting adalah bahwa dia menuliskan karyanya ini dengan rasa simpati besar pada penduduk asli Indonesia yang oleh penulis sebelumnya simpati seperti itu tidak pernah diperlihatkan.¹⁸

Adanya berita tentang sisa-sisa peninggalan kuno di suatu desa (belakangan di kenal sebagai Trowulan) telah mendorong Sir Thomas Stamford Raffles (1811-1816) untuk membentuk komisi yang bertugas melakukan survey pembuktian dan meminta Wardenaar (1785-1869) sebagai penanggung jawab survey tersebut. Johannes Willem Bartolomeus Wardenaar (1785-1869), mantan kapten di kesatuan insinyur tentara kolonial Belanda berhasil menemukan sisa-sisa peninggalan kuno tersebut dalam bentuk bangunan. Wardenaar melakukan survey pada September dan Oktober 1815 di Trowulan. Peta Wardenaar memang tidak pernah dipublikasikan, namun hasil temuannya telah menjadi bagian dari pengkayaan karya Raffles yang fenomenal, yaitu *The History of Java (1817)*.¹⁹ Karena keterkaitan nama Majapahit dan sisa-sisa peninggalan kuno di Trowulan secara jelas termaktub dalam karya tersebut, dan ditambah dengan simpatinya terhadap masyarakat nusantara, Raffles telah dianggap sebagai birokrat asing yang mampu menghadirkan suatu revolusi dalam

¹⁸Bernard H.M. Vlekke. 2008. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), hlm. 302-303.

¹⁹Thomas Stamford Raffles. 2008. *The History of Java*. Hamongan Simanjuntak dan Reviando B. Santosa (ed). Yogyakarta: Penerbit Narasi, hlm. 397-398. Amrit Gomperts, Arnoud Haag and Peter Carey menyatakan telah menemukan kembali “*Plan of Majapahit*” yang tidak dipublikasikan oleh Wardenaar di Drake Collection of the British Museum, Lihat Amrit Gomperts, Arnoud Haag and Peter Carey. 2008. “Stutterheim’s Enigma: The mystery of his mapping of the Majapahit kraton at Trowulan in 1941”. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (BKI) 164-4 (2008)*, hlm. 421.

historiografi Indonesia melalui penulisan sejarah yang *Indonesiasentris* bahkan *Javanosentris*.²⁰

Meskipun demikian, tidak banyaknya ulasan Trowulan dalam karya Raffles yang fenomenal itu mengundang banyak teka-teki apakah Raffles sendiri memang tidak menaruh ketertarikan terhadap sisa-sisa peninggalan di Trowulan. Apabila dikaitkan dalam konteks periode saat itu, kemegahan Borobudur sebagai bangunan tunggal tentu lebih menarik daripada sisa-sisa peninggalan di Trowulan yang menyebar di antara semak-semak hutan jati. Dengan adanya fakta-fakta lain selain dari kecil perhatiannya itu, status Raffles sendiri sebagai pemrakarsa konservasi di Trowulan dan situs-situs lain memang patut dipertanyakan. Keraguan terhadap Raffles yang muncul di kalangan para ahli seolah didukung oleh bukti tentang rekam jejaknya sendiri, yang ternyata dia telah membawa temuan sisa-sisa peninggalan kuno di Trowulan ke negara asalnya. Fakta ini diperkuat oleh kenyataan lain di mana dia dianggap sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas perampasan benda-benda keraton Yogyakarta. Dengan kata lain, ironisme telah muncul mewarnai diri Raffles yang pada satu sisi dia seperti seorang pemrakarsa penyelamatan benda-benda kuno, tetapi pada sisi lainnya ia seolah bertindak sebagai seorang pencuri. Memang pertanyaan lain kemudian muncul, yakni apakah pengambilan barang-barang kuno tersebut sebagai bagian dari upaya penyelamatan sisa-sisa peninggalan kuno dari ancaman perdagangan ilegal barang-barang antik, yang telah berkembang sejak masa itu.

²⁰Hasan Djafar. 2012. *Masa Akhir Majapahit: Girindrawardhana dan Masalahnya*. Depok: Komunitas Bambu, hlm. 33.

Kepentingan Raffles memang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan negaranya untuk mengokupasi Jawa, yang saat itu untuk menggantikan kedudukan kolonial Belanda. Bagi para Direktur Perusahaan Inggris, prospek menyerang Jawa sebenarnya tidaklah menarik, sehingga mereka tidak mau memperoleh kedaulatan atas Jawa, karena mereka sangat memandang rendah nilai ekonomis pulau tersebut. Pemerintah Inggris ingin melakukan ekspedisi ke Jawa itu karena alasan-alasan strategis, dan walaupun mereka mengklaim Jawa untuk tahta Britania, tetapi mereka tidak tertarik menduduki pulau Jawa secara permanen. Penyerangan Inggris ke Jawa dirancang sebagai ekspedisi hukuman untuk Belanda, dengan menghancurkan benteng dan merampas senjata mereka.²¹

Sebagai Gubernur Jenderal India saat itu, Lord Minto mempersiapkan ekspedisinya melawan Belanda dengan mengumpulkan sejumlah orang yang memiliki minat terhadap sejarah, adat istiadat Indonesia dan bahasa Melayu, yaitu orang yang memiliki pandangan humaniter seperti dirinya. Salah satunya adalah Dr. John C. Leyden yang kemudian merekomendasikan Raffles untuk membantu rencana Lord Minto di Jawa. Akhir abad ke-18 telah ditandai oleh kemunculan sikap-sikap anti-kolonialisme dari sebagian intelektual Eropa Barat, yang menolak ekspansi Eropa berdasarkan alasan kemanusiaan dan ekonomi. Raffles termasuk pihak yang cenderung progresif untuk menentang kebijakan Belanda di Jawa. Ia menghendaki orang Melayu memiliki wakil dalam parlemen. Perhatian Raffles terhadap kebudayaan Jawa terlihat ketika ia menyarankan agar dihidupkannya kembali kekuasaan raja-raja Majapahit dengan tujuan membantu pengawasan terhadap bangsa Melayu. Situasi seperti ini dimaksudkan untuk memudahkan Inggris dalam

²¹Bernard H.M. Vlekke. 2008, hlm. 286-287.

menguasai seluruh kepulauan nusantara dan memperoleh dukungan dari raja-raja lokal.²²

2.2 Menjadi Urusan Negara

Setelah Belanda berkuasa kembali di Indonesia, benda warisan budaya Indonesia, yang mereka bisa kelola, dianggap akan dapat meningkatkan citra mereka di luar negeri. Untuk itu Pemerintah Belanda membentuk komisi khusus yang menangani warisan budaya di Indonesia pada tahun 1822. Pada saat itulah, upaya pengelolaan warisan budaya untuk pertama kalinya menjadi urusan lembaga pemerintah, meskipun kerja komisi tersebut sebenarnya tidak cukup efektif.

Setelah Raffles angkat kaki dari Pulau Jawa, upaya konservasi melalui penelitian-penelitian arkeologi dan sejarah di Trowulan sempat mengalami kemandegan, yaitu pada periode 1825-1830.²³ Di Jawa saat itu terjadi peristiwa besar dengan lahirnya pergerakan yang dipimpin oleh anak-anak dari bangsawan Jawa dengan menentang kebijakan kolonial yang tidak memikirkan keberadaan masyarakat pribumi. Pergerakan tersebut dikenal sebagai Perang Jawa (1825 – 1830), yang mampu mendapatkan perhatian Belanda untuk segera mengerahkan segenap kekuatan dalam usaha-usaha penumpasan.²⁴

²²Bernard H.M. Vlekke. 2008, hlm. 290.

²³Proses konservasi untuk melanjutkan upaya Raffles menjadi berhenti sementara dan periode ini telah menggambarkan adanya suatu keterbatasan yang harus ditempuh oleh pemerintah kolonial ketika upaya-upaya konservasi sedang dijalankan. Konservasi yang dimaksud adalah upaya-upaya yang dimulai sejak penemuan awal, penggalian arkeologi yang dibantu oleh pembacaan naskah-naskah kuno, perlindungan dan upaya me-rekonstruksi peninggalan arkeologi.

²⁴Lihat Peter Carey

Setelah Perang Jawa berakhir, Jawa Timur menjadi daerah yang terbuka dan intensif bagi pertanian tebu. Industri gula telah muncul dan berkembang selama periode ini, termasuk di Trowulan Mojokerto. Dampak yang nyata adalah terjadinya perubahan lanskap dan demografi penduduk, karena banyak masyarakat dari daerah lain yang didatangkan oleh Belanda untuk dijadikan sebagai pekerja perkebunan tebu dan industri gula.²⁵ Pembangunan industri-industri gula di Trowulan Mojokerto telah menjadi halangan bagi konservasi selanjutnya. Kota-kota seperti Madiun, Kediri dan terutama Mojokerto bersama Sidoarjo, saat itu menjadi titik-titik pusat perkebunan gula. Di dalam Karesidenan Surabaya saja pada tahun 1930 sudah terdapat 36 pabrik gula. Di dalam sistim sentra produksi gula, Mojokerto ternyata mempunyai tempat yang khusus. Oleh karena letaknya di delta Brantas yang rendah, keadaannya amat bagus untuk padi dan tebu. Meskipun tanahnya banyak mengandung air, namun pada pertengahan abad ke-19 pembangunan pabrik-pabrik gula yang diperlukan dapat diselesaikan dengan baik.²⁶

Disamping urusan pembangunan ekonomi, Belanda tetap memikirkan urusan kebudayaan masyarakat Hindia Belanda. Kebijakan ini tercermin ketika tahun 1851, didirikan KITLV yang bertempat di Leiden. Lembaga ini telah memberi sumbangan penting dalam membangun pengetahuan tentang penduduk, kebudayaan, dan masyarakat Hindia-Belanda melalui cabang ilmu bernama *Indologie* atau *Indonesainistiek* (studi tentang bahasa dan kebudayaan Indonesia). Sesuai dengan

²⁵Amrit Gomperts, Arnoud Haag and Peter Carey.

²⁶Handinoto. *Kebijakan Politik dan Ekonomi Pemerintah Kolonial Belanda yang Berpengaruh Pada Morfologi (Bentuk Dan Struktur) Beberapa Kota Di Jawa*. Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 32, No. 1, Juli 2004: 19 – 27.

namanya, KITLV dikontrol kuat oleh Belanda. Peran negara terlihat dalam berbagai hal, seperti upaya-upayanya dalam mendorong penelitian-penelitian, menjembatani hubungan di antara para akademik, dan menyelaraskan dinamika di dunia akademik dengan dinamika birokrasi kolonial Hindia Belanda.²⁷

Awalnya KITLV didirikan melalui kolaborasi antara para politisi di Belanda dengan para ilmuwan terkemuka dari negara tersebut. Tokoh-tokohnya antara lain, J.C. Baud, mantan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, T. Roorda, dan guru besar kajian Jawa di Koninklijke Academie, serta lainnya. Tokoh-tokoh ini memiliki pengetahuan tentang Hindia Belanda dan juga kepentingan terhadapnya. Namun, mereka juga mampu bekerja sama untuk mengembangkan kajian Hindia-Belanda demi kepentingan kolonial secara luas. Di sini kita melihat bagaimana kepentingan kolonial melekat erat dengan hasrat intelektual.

Di samping untuk menjawab kebutuhan para intelektual untuk memahami Hindia Belanda, KITLV juga ditujukan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemerintah kolonial (akademik maupun praktek) dalam mengatur Hindia-Belanda. Secara khusus, KITLV dirancang untuk menggantikan peran para misionaris yang sebelumnya mengisi peran menyelidiki masyarakat jajahan. Jasa-jasa para misionaris dalam hal tersebut tidak diragukan lagi, dan negara memang diuntungkan dengan usaha para misionaris ini, namun mereka juga harus memikirkan keadaan politik pada masanya. Saat itu, negara yakin bahwa mengganti peran misionaris dengan lembaga penelitian yang sekuler dapat meminimalisir konflik di antara para misionaris Belanda dengan para pemimpin Muslim di masyarakat Hindia.

²⁷Hanneman Samuel. 2010. *Genealogi Kekuasaan, Ilmu Sosial Indonesia: dari Kolonialisme Belanda hingga Modernisme Amerika*. Depok: Kepik Ungu, hlm. 12.

Menggunakan lembaga penelitian diyakini lebih efisien ketimbang menggunakan para misionaris seperti yang dilakukan pada masa VOC.

Pada tahun 1875 didirikan perkumpulan peminat kajian arkeologi di kalangan orang-orang Belanda (*Archaeologische Vereeniging*). Pada tahun 1885, pemerintah Belanda ikut membidani lahirnya perkumpulan peminat tinggalan sejarah dan purbakala amatir di Yogyakarta, yang kemudian berhasil mendirikan Museum Sono Budoyo di dekat Kraton Yogyakarta. Kiprah pemerintah ini, pada sisi lain, adalah bukti bahwa upaya pengelolaan warisan budaya telah menjadi urusan lembaga pemerintah.

Upaya-upaya penelitian di Trowulan masih terus dilakukan oleh para ahli kolonial. Seorang insinyur bernama Roger Verbeek (1845-1926) mengadakan kunjungan ke *Trowulan* dan menerbitkan teks tentang daftar gambar pada peta Wardenaar. Laporan penelitiannya terdapat dalam artikel *Oudheden van Majapahit in 1815 en 1887* dalam TBG XXXIII tahun 1889.²⁸ Pada tahun 1894, naskah *Negarakratagama* ditemukan oleh Dr. Brandes di kompleks Istana Cakranegara Lombok.²⁹ Penemuan ini berarti bahwa sumber tentang Majapahit tidak lagi hanya terdapat pada objek cagar budaya, melainkan juga pada teks. *Negarakratagama* adalah naskah Mpu Prapanca yang berisi informasi-informasi tentang Kerajaan Majapahit. Kern menerjemahkan *Negarakratagama* sebagai seri artikel di *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* BKI antara tahun 1905-1914. Periode ini ditandai dengan munculnya interpretasi-interpretasi teks *Negarakratagama* oleh para ahli kolonial.

²⁸Lihat I Made Kusumajaya. tt. *Mengenal Kepurbakalaan Majapahit Di Daerah Trowulan*, Mojokerto: BP3 Jatim.

²⁹Soewarsono, dkk. 2007. *Nasionalisme dalam Konteks Otonomi Daerah: Pemekaran dan Implikasinya*. LIPI Press, Jakarta, hlm. 39.

Pada tahun 1900, benda-benda warisan budaya Indonesia dipamerkan dalam Pameran Kolonial Internasional di Paris dan mendapat perhatian yang luar biasa dari khalayak Eropa. Sukses ini mendorong pemerintah kolonial Belanda untuk menggiatkan lagi komisi yang dulu pernah ada. Penelitian arkeologi kemudian menjadi agenda resmi kegiatan pemerintah kolonial Hindia-Belanda, yang karenanya pada tahun 1901 dibentuklah *Commissie in Nederlandsch-Indie voor Oudheidkundig onderzoek op Java en Madura*, dan Brandes ditunjuk sebagai ketua lembaga tersebut.

Komisi ini menangani kajian dan pemugaran candi-candi di Jawa, dan memupuk minat akan arca-arca dan benda perunggu dari zaman dahulu kala. Komisi ini bekerja efektif hanya sampai tahun 1905 dan kinerjanya merosot setelah ditinggal Brandes yang wafat pada tahun itu. Penggantinya, N.J. Krom, baru ditunjuk pada tahun 1910. Krom menganggap pengelolaan warisan budaya di Indonesia tidak mungkin hanya ditangani oleh sebuah komisi, mengingat begitu banyaknya jumlah dan ragam warisan budaya yang ada. Karena itu, Krom lalu mengusulkan agar ‘komisi’ tadi ditingkatkan menjadi ‘jawatan’ atau ‘dinas’ dengan diperkuat oleh para peneliti arkeologi dan sejarah yang handal.

Atas desakan Krom, pada tanggal 14 Juni 1913, Pemerintah Belanda mendirikan *Oudheidkundige Dienst in Nederlandsche-Indie* (Dinas Purbakala Hindia Belanda). Sejak saat itu, semua urusan yang berkaitan dengan warisan budaya di Hindia Belanda dikelola oleh negara, bahkan hingga saat ini. Di lingkungan Arkeologi, pelembagaan urusan warisan budaya tersebut disebut sebagai “*archaeology in the service of the state*” atau ‘Arkeologi

pengabdian negara'.³⁰ Setelah perang dunia I, muncul kembali gerakan yang berkaitan dengan permuseuman secara lebih sistematis, yang dalam beberapa tahun kemudian mendirikan beberapa museum daerah di berbagai provinsi: Sonobudoyo di Yogya, Radyopustoko di Surakarta, Museum Denpasar di Bali, Museum Kota Raja, Pematang Siantar, dan sebagainya. Dengan mengikuti prosedur penataan kronologis dan estetis pengetahuan Barat, lembaga-lembaga jenis baru itu sebenarnya berjalan bertentangan dengan sikap-sikap kuno. Lembaga pelestari "tak bernama" itu, yang menyimpan benda-benda tanpa pemilik dan memamerkannya ke mata sembarang orang, hanya memuaskan kelompok kecil yang tersentuh oleh gagasan-gagasan baru. Raden Saleh, sebagai anggota *Bataviaasch Genootschap*, misalnya, menyerahkan beberapa naskah lontar yang berharga kepada perpustakaan, dan pada tahun 1865 ia sendiri melakukan penelitian paleontologis di Jawa Tengah.³¹ Dapat disebutkan juga bahwa pada awal abad ke-20 tercatat nama RAA Kromodjojo Adinegoro, bupati Mojokerto, yang secara pribadi meminati penggalian situs kerajaan Majapahit dan menyumbang penataan sebuah museum kecil di kotanya.³²

2.3 Warisan Budaya dan Gagasan Nasionalisme

Pada tahun 1920-an, Maclaine Pont, seorang arsitek dari Belanda menghubungkan gambaran Kota Majapahit dalam *Nagara-*

³⁰Daud A. Tanudirjo. *Warisan Budaya Untuk Semua Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Indonesia Di Masa Mendatang*. Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Makalah Disampaikan Dalam Kongres Kebudayaan V Di Bukittinggi, Sumatra Barat Pada Sumatera Barat 19 -23 Oktober 2003.

³¹Denys Lombard. 2005, hlm. 212-213.

³²Lihat buku Soediman. 1965. *Pusaka Madjapahit di Trowulan*. Mojokerto, hlm. 12.

kretagama dengan peninggalan arkeologi di Trowulan.³³ Maclaine Pont membenarkan anggapan-anggapan Raffles, dengan melakukan penggalian hampir di seluruh penjuru Trowulan tahun 1924 – 1926. Hasil penelitiannya menunjukkan keberadaan pondasi-pondasi bangunan, saluran air, dan waduk-waduk di wilayah Trowulan. Ia berhasil membuat sketsa “kota” Majapahit di Trowulan. Maclaine Pont turut mendirikan lembaga bernama *Oudheidkundige Vereeniging Majapahit* (OVM) pada tahun 1924 yang bertujuan untuk memayungi kegiatan penelitian arkeologi di Trowulan. Sekitar dua tahun kemudian, Maclaine Pont bekerjasama dengan RAA Kromodjojo Adinegoro merintis berdirinya Museum Trowulan yang pertama.³⁴ Catatan lain adalah adanya kegiatan antara tahun 1925 dan 1930 oleh Belanda dan Austria melalui arsitek mereka, yakni Henri Maclaine Pont (1884-1971) dan Bruno de Nobile Vistarini (1891-197?) dalam menggali segmen 150 meter dari dinding istana utara di sisi timur dari Panggung tersebut, termasuk dinding internal, yang ber dinding bata 'vyver'.

Sejak didirikannya Dinas Purbakala, pengelolaan warisan budaya menjadi urusan negara. Peran Negara semakin kuat dengan ditetapkannya *Monumenten Ordonnantie no. 19 tahun 1931 Staatblad 238* (diperbaiki tahun 1934). Ketentuan ordonansi itu

³³Naskah Nagarakretagama, pupuh VIII-XII, merupakan sumber tertulis yang penting untuk mengetahui gambaran Kota Majapahit sekitar tahun 1350 M.

³⁴Menjamurnya museum-museum di sepanjang wilayah Asia Tenggara sekarang ini menyiratkan adanya proses umum pewarisan politis yang tengah berlangsung. Hingga abad ke-19, para penguasa kolonial di Asia Tenggara mempertontonkan minat yang sangat tipis terhadap monumen-monumen antik peradaban-peradaban yang mereka taklukan di sana, lihat Benedict Anderson. 2001. *Imagined Communities*. Yogyakarta: Insist Press. hlm. 276.

menyiratkan begitu besarnya penguasaan negara atas warisan budaya. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya MO 1934 merupakan upaya pemerintah kolonial Belanda untuk menjamin akses mereka terhadap warisan budaya milik bangsa Indonesia. Dengan demikian, para peneliti dan peminat benda cagar budaya yang mayoritas orang Eropa dapat lebih leluasa melakukan eksplorasi sumberdaya budaya itu.

Keberadaan OVM telah membuat sejarah Majapahit semakin dikenal terutama di kalangan kaum terpelajar di Indonesia dan memuncak pada masa perjuangan kemerdekaan. Mereka yang sedang mencari sosok bentuk negara Indonesia seakan menemukan jawabannya pada sejarah Kerajaan Majapahit yang berhasil direkonstruksi oleh para sejarawan ketika itu.³⁵ Berbeda dengan Maclaine Pont yang memfokuskan aspek arkeologis atas dasar naskah *Nagarakrtagama*, Yamin menggunakan naskah itu secara berbeda. Sekitar tahun 1934, Yamin mengkonstruksi *Nagarakratagama* sebagai justifikasi gagasan nasionalismenya ditengah-tengah kesibukan para pemuda yang mencari bentuk bangsanya. Gagasan nasionalisme Yamin tercermin dalam sebuah novel berjudul *Ken Arok dan Ken Dedes*, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah “The Modern Majapahit”.³⁶

Yamin bukanlah tokoh nasionalis pertama yang memasukkan Majapahit dalam gagasan nasionalismenya. Sebelumnya telah terdapat kelompok yang menggunakan Majapahit sebagai tanda

³⁵Daud A. Tanudirjo. tt. *Warisan Budaya Majapahit dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Arkeologi*, hlm. 3 (*unpublished*)

³⁶Soewarsono, dkk. 2007. *Nasionalisme Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah*. LIPI Press, Jakarta, hlm. 85. Soewarsono mencuplik Nidhi Aeusrivongse, “Fiction as History: A Study of Pre-War Indonesian Novels and Novelists (1920-1949), Ph.D dissertation, University of Michigan, 1976, hlm. 306.

pembeda antara Jawa dengan daerah lain di Hindia Belanda. Kelompok yang memiliki tokoh utama bernama Soetatmo Soeriokoesoemo ini, dapat diidentifikasi sebagai kelompok yang mengusung nasionalisme Jawa. Perbedaan Yamin dengan para nasionalis Jawa tersebut, bukan terletak pada upaya Yamin menempatkan Majapahit dalam konteks Indonesia, namun pada penafsirkannya atas Majapahit pada teks *Negarakratagama*. Melalui naskah itu, Yamin menerjemahkan kekuasaan wilayah Majapahit sebagai batas-batas Indonesia yang merdeka dari penjajahan. Dengan menggunakan kata Nusantara – sebuah istilah dalam *Negarakratagama* – Yamin menunjukkan bentangan Indonesia yang terdiri dari “*eight groups of islands...the Malay peninsula, the islands of Sumatra, of Kalimantan (Borneo), of Java...the group now know as ...Southeastern Islands, the islands of Sulawesi, the groups of the Mollucas and the territory of West Irian.*”³⁷ Dengan melihat Indonesia sebagai kata lain dari Nusantara, Yamin merujuk Indonesia pada “*something inherited from the ancient past*”, di mana bekas wilayah kerajaan Majapahit adalah wilayah Republik Indonesia.

Gagasan Yamin ini berbeda dengan nasionalismenya Soekarno. Dengan mengidentikkan Indonesia dengan Hindia Belanda, Soekarno berpendapat bahwa wilayah Indonesia setelah merdeka adalah sebatas bekas wilayah Hindia Belanda. Gagasan Soekarno ini bersifat “*colonial nationalism*”, meskipun dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Soekarno mengatakan bahwa Indonesia mengalami *nationale staat* dua kali (Sriwijaya dan Majapahit). Walaupun demikian, dalam hal ini Soekarno tidak

³⁷Soewarsono, dkk. 2008, hlm. 38-40.

mengkontekskan negara yang akan didirikan pada kedua kerajaan tersebut.³⁸

Meskipun berbeda, Soekarno sebenarnya juga kemudian terpengaruh oleh gagasan Yamin tentang wilayah Nusantara ketika muncul persoalan Irian Barat pada tahun 1950. Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia menghendaki Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia.³⁹ Ide yang merujuk pada Majapahit ini juga digunakan untuk klaim atas Kalimantan Utara dan Singapura sebagai bagian dari republik ini. Majapahit dalam hal ini adalah model untuk negara yang kemudian disebut sebagai NKRI. Pada zaman Orde Baru, gagasan nasionalisme “Majapahit” Yamin kembali terwarisi dalam kasus integrasi Timor Portugis ke dalam negara Republik Indonesia.

Apa yang dikemukakan di atas cukup menarik, mengingat arsitek utama dari konsep ke-Indonesiaan, yang sebenarnya berbasis Jawa, bukanlah seorang Jawa tetapi Yamin yang berasal dari Sumatera Barat. Menurut pandangannya, peta Indonesia sudah tersusun pada zaman kejayaan Majapahit dengan pemimpin militer yang dapat diteladani dan cocok dengan semangat perjuangan revolusi. Memang tidak semua orang setuju dengan gambaran tersebut, karena kaum intelektual, seperti Muhammad Hatta, Takdir Alisjahbana, dan para pemuka politik di luar Jawa menentang pandangan “imperialisme Majapahit Baru” seperti itu. Hatta dan Tan Malaka secara tegas mengecam penekanan pada warisan feodal dari kerajaan-kerajaan lama dan periode kolonial.⁴⁰ Sebagian kalangan menganggap bahwa penekanan

³⁸Soewarsono, dkk. 2008, hlm. 45.

³⁹Soewarsono, dkk. 2007, hlm. 76-77.

⁴⁰Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Hapsari. 2008. “Memikir Ulang Historiografi Indonesia” dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Hapsari (ed). *Perspektif Baru Penulisan*

masa depan negara Indonesia dari segi militer pada konsepsi yang dibuat oleh Majapahit adalah didasarkan pada tafsir yang salah atas *Negarakratagama*, yakni Majapahit menguasai seluruh kepulauan, termasuk Timor Timur, yang dianggapnya sebagai semacam kediktatoran militer. Meskipun Supomo sudah dari awal menunjukkan bahwa mitos ini menyesatkan, versi ini masih tetap dipertahankan di Indonesia pasca-Soeharto.⁴¹

Persepsi mayoritas bangsa Indonesia terhadap kebesaran Majapahit tetap terpelihara dengan dipakainya berbagai simbol-simbolnya oleh Orde Baru. Hal ini bisa dilihat dari konsep “Bhinneka Tunggal Ika” yang diangkat menjadi semboyan bangsa Indonesia untuk menghargai keragaman budaya, “Sumpah Palapa” yang dijadikan nama satelit komunikasi, dan nama “Majapahit”, “Gajah Mada”, dan “Hayam Wuruk” yang diabadikan menjadi nama tempat dan jalan di berbagai provinsi di Indonesia. Pertanyaan adalah mengapa Majapahit begitu mendapat tempat di hati para penguasa Orde Baru dan mungkin bangsa Indonesia pada umumnya ? Daud Aris Tanudirdjo (pakar arkeologi Indonesia) menyatakan bahwa dari sisi jumlah dan kualitasnya candi-candi Majapahit sebenarnya tidak dapat menyamai candi-candi Masa Mataram. Begitu pula Majapahit tidak dapat menyamai Sriwijaya yang pernah menjadi pusat pendidikan pada zamannya, karena hingga saat ini belum ditemukan bukti bahwa Kerajaan Majapahit pernah menjadi

Sejarah Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV – Jakarta; Denpasar: Pustaka Larasan, hlm. 8-10. Lihat juga Restu Gunawan 2005. *Muhammad Yamin dan cita-cita persatuan*. Yogyakarta: Ombak.

⁴¹Adrian Vickers. 2008. “Mengapa tahun 1950-an penting bagi Kajian Indonesia” dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Hapsari (ed). *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV – Jakarta; Denpasar: Pustaka Larasan, hlm. 71.

pusat pendidikan seperti itu. Majapahit memang memiliki struktur pemerintahan yang cukup kompleks dengan sistem birokrasi dan tata hukum yang mapan dan mungkin saja benar kalau wilayah Majapahit termasuk yang terluas di antara wilayah kerajaan-kerajaan lain di Indonesia. Namun menurutnya, gambaran luas wilayah itu lebih banyak disandarkan pada tafsiran beberapa pupuh Nagarakertagama dan Pararaton.⁴² Penggunaan simbol-simbol Majapahit, dengan maksud memperlihatkan kejayaannya, terjadi pada masa menjelang dan setelah kemerdekaan Indonesia, karena pada saat itu para pemimpin bangsa mencoba mencari bentuk negara dan masyarakat yang harus mereka bangun. Karena Majapahit adalah kerajaan besar, para pemimpin tadi menemukannya pada sosok Majapahit.⁴³

⁴²Daud Tanudirdjo. tt. *Warisan Budaya Majapahit dalam Perspektif Manajemen Sumberdaya Arkeologi*. (unpublished), hlm. 1.

⁴³Daud Tanudirdjo. tt. *Warisan Budaya Majapahit dalam Perspektif Manajemen Sumberdaya Arkeologi*. (unpublished), hlm. 3.

BAB 3

POLITIK EKONOMI DALAM PELESTARIAN

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), berbagai urusan termasuk pengelolaan kebudayaan diambil alih oleh pemerintah pendudukan. Sebagai bagian dari pengambil alihan wewenang ini adalah penutupan Museum yang merupakan pusat informasi Trowulan setelah Henry Maclaine Pont ditawan oleh Jepang. Pemerintah Jepang mengambil alih pengelolaan Museum ini dengan maksud untuk menjaga aset-asetnya. Walaupun agak terganggu dengan kehadiran tentara pendudukan, kegiatan-kegiatan penelitian arkeologis di Trowulan tetap berjalan. Setelah kemerdekaan, penelitian-penelitian ini dilakukan kembali dengan semangat nasionalisme dan untuk menjaga NKRI. Memang disayangkan bahwa pada masa Orde Baru (1965 – 1998) intervensi pemerintah untuk menata warisan budaya dimulai kembali.

Meskipun terdapat pembatasan dan intervensi, proyek penelitian pada masa Orde Baru seolah melanjutkan misi kolonial sebelumnya, yakni melakukan penelitian pada situs-situs yang menyebar di Trowulan. Akan tetapi berbeda dengan masa kolonial, pada masa Orde Baru, penelitian-penelitian arkeologis di Trowulan sudah banyak melibatkan para ahli dari Indonesia, yang terdiri dari berbagai pakar, baik dari akademisi ataupun birokrat. Fokus penelitian diarahkan pada kondisi geografi wilayah dan keberadaan batas-batasnya. Pada tahun 1970-an, LAPAN, misalnya, membuat foto udara di Trowulan dan sekitarnya. Hasil foto menunjukkan adanya kanal-kanal yang merupakan jalur-jalur yang bersilangan saling tegak lurus dengan orientasi utara-selatan dan barat-timur. Selain LAPAN, instansi

lain yang ikut melakukan penelitian di Trowulan adalah Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). Instansi tersebut yang bekerja sama dengan universitas telah membuktikan bahwa Trowulan berada di ujung kipas aluvial vulkanik yang luas. Keberadaan kanal di Trowulan semakin jelas ketika didukung oleh pengamatan di lapangan pada tahun 1981-1983.

3.1. Rencana Induk Arkeologi

Pada tahun 1986, pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) merancang Rencana Induk Arkeologi bekas kota Kerajaan Majapahit, Trowulan. *Master Plan* tentang itu diharapkan dapat men-sistematis-kan program-program yang ditujukan untuk perlindungan Trowulan. Pusat Arkeologi Nasional yang juga berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan kerjasama dengan *Ford Foundation* dengan mengadakan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Arkeologi Indonesia (*Indonesian Field School of Archeology / IFSA*) pada tahun 1991–1993. Kegiatan itu melibatkan kurang lebih 100 instansi bidang kebudayaan. Hasil dari penelitian IFSA mendukung penelitian sebelumnya yang mendudukkan Trowulan sebagai sebuah peninggalan Majapahit.

Pemerintah Indonesia nampaknya tetap mempertahankan kedudukannya sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh dalam pengaturan warisan budaya. Masyarakat belum diberikan peran penting karena diposisikan sebagai pihak yang tidak mengerti apa-apa tentang warisan budaya. Undang-Undang No.5 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya menempatkan pemerintah sebagai pengatur utama benda cagar budaya, termasuk peninggalan-peninggalan arkeologi di Trowulan. Penelitian-penelitian yang diprogramkan oleh pemerintah dan

biasanya dibantu oleh para ahli dari kalangan akademisi lebih sering menempatkan “benda” sebagai tujuan utama, maksudnya benda cagar budaya untuk diselamatkan. Dalam hal ini pemerintah seperti mengabaikan atau merasa tidak perlu akan partisipasi atau dukungan masyarakat. Pemerintah masih menganggap masyarakat lokal Trowulan sebagai pihak yang tidak cukup mengerti tentang peninggalan-peninggalan kuno yang tersebar di sekitar tempat tinggal mereka. Pandangan pemerintah ini seolah diperkuat oleh kenyataan bahwa masyarakat Trowulan telah melakukan pengrusakan, sebagai akibat dari ketidak tahuannya, terhadap peninggalan arkeologi melalui penggalian lahan untuk memproduksi batu bata.

Rencana Induk Arkeologi (RIA) bekas kota Kerajaan Majapahit dirancang oleh sejumlah ahli arkeologi seperti, Prof. Mudardjito, Guru Besar Arkeologi Universitas Indonesia dengan maksud untuk men-sistematis-kan program-program bagi perlindungan Trowulan. Pada masa ini, para ahli memiliki *power of knowledge* yang besar untuk mempengaruhi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pelestarian cagar budaya. Dalam RIA, wilayah Trowulan dibagi ke dalam klaster-klaster untuk memudahkan pelestarian situs. Sayangnya, pembagian ke dalam klaster-klaster ini melupakan konsep kawasan yang sudah diterapkan di Borobudur. Dengan sistim klaster situs yang ada di dalamnya memang kelihatan rapi di mana situs tersebut ditata dengan dikelilingi pagar yang mencerminkan konsep pelestarian saat itu. Tetapi karena Trowulan terdiri dari berbagai situs yang menyebar di antara lahan-lahan dan pemukiman penduduk, sistim ini sendiri tidak memberikan jaminan terpeliharanya situs yang ada. Dalam hal ini masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa, mencari kebutuhan hidup melalui usaha pertanian dan batu bata.

Melihat aktivitas masyarakat di sekitar situs dan kepentingan negara terhadap Trowulan, RIA Majapahit 1986 nampaknya merupakan sebuah program yang tergesa-gesa, karena tidak memikirkan dampak yang akan terjadi apabila aktivitas penggalian lahan oleh masyarakat tetap berlangsung. Mungkin-kah permasalahan yang ada di Trowulan adalah akibat dari program tersebut? Kalaupun tidak, mengapa para pakar, yang mengerti bahwa di luar klaster banyak peninggalan yang dirusak oleh masyarakat, tidak memasukkan warisan-warisan budaya tersebut ke dalam klaster-klaster lainnya. RIA Majapahit 1986 yang dirumuskan pada masa Orde Baru seharusnya mendapat dukungan kuat dari pihak pemerintah, yang bukan saja menghentikan perusakan-perusakan tetapi juga memperkuat program-program pelestarian. Sayangnya evaluasi terhadap RIA Majapahit 1986 tidak menjadi perhatian pemerintah hingga saat ini.

3.2. Masyarakat Trowulan

Masyarakat Trowulan memang telah memanfaatkan lahan sebagai bagian dari aktivitas pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka. Lahan di Trowulan yang dianggap kurang subur telah dijadikan sebagai bahan untuk batu bata yang dijual oleh mereka. Kegiatan ini telah berlangsung lama sejak 1950-an. Di dalam lahan tersebut banyak terdapat sisa-sisa benda-benda atau struktur kuno peninggalan yang bersifat arkeologis. Benda-benda kuno ini ikut terbawa dan tergerus selama proses pengambilan tanah.

Mayoritas penduduk Kecamatan Trowulan adalah petani, namun karena pertanian sering mengalami keterpurukan yang disebabkan oleh meningkatnya harga pupuk, maka banyak masyarakat yang mencari nafkah tambahan melalui beberapa

bentuk pekerjaan untuk menopang perekonomian keluarga. Salah satunya adalah penggalian tanah untuk mendapatkan batu bata. Penggalian tanah yang ada diduga dapat merusak situs cagar budaya yang ada di bawahnya, mengingat penggalian tanah tersebut banyak dilakukan di sekitar situs cagar budaya.

Penggalian tanah untuk usaha batu bata oleh para linggan (sebutan bagi pengusaha bata) dianggap mengancam atau bertentangan dengan upaya-upaya pelestarian. Pertama, dengan penggalian tanah oleh masyarakat tersebut, konstruksi bekas kota Kerajaan Majapahit di Trowulan yang banyak menggunakan batu bata yang tertanam hanya dalam kedalaman 1-1,5 meter ikut rusak. Dengan adanya penggalian tersebut, sekitar 50 persen dari situs Trowulan rusak. Sampai pertengahan tahun 1990-an ada sekitar 2.400 linggan. Selain itu, penggalian juga menyebabkan kesuburan tanah hilang karena lapisan atas tanah yang mengandung zat hara tanah atau humus ikut terbawa. Para penggali biasanya akan meninggalkan lubang bekas galian itu begitu saja setelah selesai mengeruk. Sejumlah warga memang sudah ada yang tidak mengambil batu bata kuno jika menemukannya dan malah memberikannya ke pemerintah. Tapi penggalian tanah ini masih terjadi, di mana sebagian masyarakat tidak lagi mengambil batu bata peninggalan Majapahit (karena sudah habis) melainkan menggunakan tanah tersebut untuk produksi batu bata baru. Untuk menyelamatkan situs tersebut pemerintah seharusnya membebaskan seluruh kawasan itu. Namun, karena wilayah situs ini sangat luas, yang memerlukan biaya yang tidak sedikit, wilayah yang bisa dibebaskan masih sangat terbatas.

Harus diakui bahwa keberadaan benda-benda cagar budaya (berupa candi, arca dan sebagainya) di Trowulan memang sangat sedikit atau belum memberikan manfaat apa-apa bagi

penduduk sekitarnya. Dengan adanya berbagai macam peraturan dan larangan, seperti dalam hal penggalian tanah itu, masyarakat mau tak mau harus menerima beban sejarah bahwa cagar budaya itu penting, bermutu tinggi, bernilai, harus dihormati keberadaannya dan sebagainya, tetapi mereka tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari keberadaan cagar budaya tersebut.

Jadi, ketika masyarakat terus menerus diserbu dengan larangan dan peraturan serta ditingkatkan kesadarannya, sementara mereka tidak mendapatkan manfaat apapun, maka yang terlintas di kepalanya adalah bagaimana mendapatkan keuntungan tersendiri dari benda cagar budaya yang ada. Kalau semula mereka tak acuh terhadap arca misalnya, mereka kemudian mengambil dan menjual arca yang mungkin tergeletak di desanya setelah mendapat informasi bahwa arca tersebut bernilai tinggi. Ini artinya bahwa mereka yang suka mencuri benda-benda purbakala itu sesungguhnya telah memiliki apresiasi yang tinggi terhadap cagar budaya, dan mereka tahu persis tentang arca yang bagus, yang punya nilai sejarah tinggi, dan tentunya juga punya nilai jual tinggi. Tak jarang mereka mengecoh petugas dengan memberi tambahan ukiran-ukiran pada peninggalan-peninggalan sejarah tersebut untuk menyamarkan kegiatan penyelundupan yang akan dilakukannya.

Dengan keadaan seperti itu, pemerintah merasa perlu untuk membuat bermacam aturan. Hal ini ternyata telah berdampak pada munculnya kecenderungan pemerintah untuk mengesampingkan masyarakat dalam setiap perumusan program-program untuk pengembangan kawasan Trowulan. Situasi inilah yang kemudian menciptakan jarak antara pemerintah dengan masyarakat hingga saat ini. Karenanya, masyarakat juga berani menyalahkan pemerintah manakala terdapat program pemerintah yang malah terindikasi ikut merusak Trowulan.

Masyarakat Trowulan sekarang hampir seluruhnya beragama Islam. Apakah mereka mempunyai kaitan dengan atau keturunan langsung dari orang Majapahit memang belum ada bukti yang menguatkan.⁴⁴ Ketika Raffles berkunjung ke Trowulan, desa ini masih sepi dari penduduk, mengingat sangat sedikit orang yang tinggal di daerah hutan tersebut. Keadaan seperti itu berkaitan dengan kemungkinan bahwa setelah kejatuhan Majapahit, Trowulan, yang berhasil dikuasai oleh tentara Islam, ditinggalkan oleh penduduknya yang bereksodus ke Bali atau daerah-daerah lain yang dianggap lebih kondusif. Segelintir orang yang menetap di Trowulan waktu itu kemungkinan besar bukanlah asli dari keturunan Majapahit. Salah seorang penduduk lokal di Trowulan menceritakan bagaimana kakeknya dulu yang berasal dari daerah Magelang berhijrah ke Trowulan, mendirikan rumah-rumah gubuk. Kepergian sang kakek diikuti oleh banyak kerabatnya yang kemudian ikut menetap di Trowulan karena terjadinya gejolak pemberontakan di daerah asal.⁴⁵ Meskipun demikian, kemungkinan lain juga bisa terjadi, yaitu karena Islam sudah banyak dianut oleh masyarakat pada masa akhir Majapahit, maka bukan mustahil bahwa orang-orang Majapahit yang sudah memeluk Islam tidak ikut eksodus apalagi hanya karena datangnya tentara Islam.

⁴⁴Kemungkinan sudah ada penduduk yang tinggal di Trowulan antara 1815 sampai 1850, seperti yang disampaikan oleh Stuartheim Enigma : “Sisa-sisa bata di Trowulan berasal dari abad pertengahan, tapi ziarah Islam di sana terjadi antara 1815 dan 1850 dan mungkin telah sengaja disiapkan oleh penduduk setempat untuk mencegah akses ke situs oleh pengusaha lokal Belanda yang tertarik mengamankan batu bata untuk pembangunan pabrik gula mereka”

⁴⁵Berdasarkan hasil wawancara dengan HY (inisial) pada tanggal 26 Maret 2013.

Meskipun mereka adalah pemeluk Islam, banyak juga dari penduduk Trowulan sekarang yang masih memegang kepercayaan kejawen, sehingga sinkretisme mewarnai keberagaman mereka, di mana mereka memegang Islam tetapi masih mewarnainya dengan kepercayaan kejawen.⁴⁶ Mereka secara kuat memegang nilai-nilai spiritual, dan mengkaitkannya dengan leluhur, serta membangun petilasan-petilasan yang diperlukan.

Selain itu, apa yang cukup menonjol di Trowulan adalah hadirnya apa yang biasa disebut sebagai komunitas santri, yakni mereka yang taat beragama dengan mempraktekkan Islam tanpa campuran kejawen. Dalam kedua masyarakat ini terdapat para seniman, pengrajin dan pengusaha batu bata dan penjaja barang dagangan sehari-hari di sekitar situs.

3.3. Pusat Informasi Majapahit (PIM)

Sejalan dengan penelitian arkeologis yang terus berlangsung di Trowulan, pemerintah merasa perlu mengembangkan kawasan itu sebagai warisan budaya yang lebih dikenal dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Pengembangan pariwisata menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memuluskan langkah tersebut. Melalui pengembangan pariwisata, bukan hanya pemerintah yang akan meraup manfaat namun juga masyarakat lokal yang dapat mendirikan bermacam-macam usaha ekonomi di sekitar Trowulan. Salah satu program yang kemudian direncanakan oleh pemerintah adalah membangun semacam pusat informasi

⁴⁶Peristiwa 1965 membawa perubahan besar. Banyak dari mereka yang tidak beragama – karena pengaruh komunisme - “dipaksa” atau terpaksa harus memeluk suatu agama yang diakui oleh pemerintah. Kebanyakan dari mereka memilih Islam, karena ia menjadi pelindung keselamatan mereka.

berskala besar tentang Majapahit yang dapat menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Trowulan.⁴⁷

Menindaklanjuti pemikiran tersebut, pada tahun 2007, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) merencanakan pembangunan Pusat Informasi Majapahit (PIM) atau juga dikenal dengan nama Taman Majapahit. PIM merupakan nama baru dari Balai Penyelamatan Arca (Museum Trowulan) yang mulai dipakai pada tahun 2007. PIM menempati sebuah situs seluas 54.935 m². Lebih dari setengah lahan sisi selatan PIM merupakan tanah situs yang di dalamnya mengandung benda cagar budaya seperti pondasi-pondasi bangunan, bekas sumur, dan berbagai macam artefak lepas.⁴⁸

Pada awalnya, arsitektur PIM mengadopsi bentuk arsitektur Jawa berupa bangunan panggung dengan atap bentuk tajuk dan limasan. Konsep ini diterima oleh Dirjen Sejarah dan Purbakala, namun pada akhirnya desainnya berubah dengan diganti oleh desain baru yang dibuat oleh arsitek Baskoro Tedjo dengan desain utamanya berdenah bintang Surya Majapahit. Baskoro Tedjo adalah salah seorang arsitek yang dipercayai Kemenbudpar untuk memberikan masukan atau alternatif desain PIM dari desain awal yang dibuat oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Masterplan Trowulan tahun 2007.

⁴⁷Konsep tentang pengembangan Trowulan sebagai aset wisata tidak terlepas dari bergabungnya bidang kebudayaan dengan pariwisata dalam satu kementerian. Pada masa itu, hanya Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang memanfaatkan Trowulan sebagai sumber pendapatan daerah melalui objek museum Trowulan.

⁴⁸Paparan Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto Wilayah Kerja Provinsi Jawa Timur, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. 2010.

Persoalan muncul ketika pembangunan yang dilakukan sekitar November 2008 itu tidak dilandasi pertimbangan arkeologis, karena ternyata pembangunan tidak menunggu hasil ekskavasi tentang layak tidaknya lokasi yang akan digunakan sebagai tempat tiang bangunan. Pembangunan PIM ini telah mengabaikan nilai-nilai pelestarian, karena seperti terbukti kemudian pondasi tiang-tiang yang sudah dikerjakan ternyata merusak struktur bangunan-bangunan Majapahit yang ada di bawah tanah sekitar areal penggalian. Berdasarkan hasil evaluasi tim pembangunan PIM yang dibentuk oleh Direktur Peninggalan Purbakala yang beranggotakan Prof. Dr. Mundardjito, Dr. Daud Aris Tanudirdjo, MA, Ir. Arya Abieta, Ir. Osriful Oesman, M.Hum., Anam Anis, SH, kegiatan pembangunan PIM ini pada Desember 2008 harus dihentikan karena dapat merusak situs yang lebih luas.

Dengan kejadian seperti itu, upaya Kemenbudpar untuk mengembangkan Trowulan melalui PIM patut dipertanyakan karena ternyata mereka lebih mengutamakan terselesaikannya pembangunan tersebut daripada pertimbangan pelestarian. Tergesa-gesanya Kemenbudpar untuk menyelesaikan PIM tadi kelihatannya terkait erat dengan sistem penganggaran pemerintah saat itu, di mana PIM dibangun menjelang akhir tahun, yang oleh karenanya segalanya harus dilakukan dengan cepat. Selain itu, proyek ini juga agak berbau politik, yakni demi kepentingan Menteri Budpar. Seperti pernah diceritakan seorang ahli arkeologi, yang menghadiri pameran kebudayaan yang diadakan oleh Kemenbudpar, Presiden RI dalam perbincangan dengan Menteri Budpar di sebuah stand miniatur rumah Majapahit, menyampaikan keinginannya agar Kemenbudpar mengembangkan Trowulan secara besar. Pesan tersebut ditangkap menteri melalui pembuatan program PIM, yang juga

dijadikannya sebuah pertarungan reputasinya dihadapan Presiden. Dalam hal ini keberhasilan pembangunan PIM akan meyakinkan masyarakat terutama budayawan bahwa Presiden mempunyai kepedulian besar untuk pembangunan kebudayaan.

Seiring dengan itu, politik jabatan juga mungkin ikut mendorong pembangunan PIM tersebut. Tindakan-tindakan kepala BPCB lama berkaitan dengan dukungannya terhadap proyek ini kelihatannya tidak didasarkan pada kelayakan dari program pemerintah ini. Manipulasi data yang diberikan oleh nya kepada pimpinannya di Pusat (Dirjen Sejarah dan Purbakala saat itu) – karena adanya janji-janji jabatan - telah membawa dampak pada berlanjutnya proses PIM. Pemeirntah pusat yang menyadari keadaan ini setelah mendapat berbagai masukan dari para ahli dan para pejabatnya sendiri seolah terjebak dalam dilemma. Akan tetapi dominannya pandangan-pandangan komodifikasi warisan budaya, yang disertai dengan adanya kewajiban untuk melanjutkan proyek karena anggaran yang ada harus segera dihabiskan dan adanya optimisme bahwa kerusakan yang terjadi tidaklah besar dan masih dapat ditolerir - mengingat manfaat ekonominya cukup besar apabila bangunan sudah terselesaikan - telah mempengaruhi pemerintah untuk tetap bertahan menyelesaikan proyek PIM.

Meskipun persoalan seputar PIM itu mungkin tidak sejauh itu, namun satu hal yang jelas adalah bahwa pengaturan Trowulan melalui pengembangan fasilitas dengan skala besar tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan tanpa persiapan yang matang. Kemenbudpar memang merencanakan pembangunan ini dengan melibatkan para ahli di berbagai bidang, seperti arkeologi dan arsitek. Selain itu, Kementerian ini juga memiliki unit pendukung di Trowulan bernama Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jawa Timur, yang membantu Kemenbudpar untuk

melestarikan warisan budaya yang tersebar di Jawa Timur, seperti di Trowulan. Dengan pegawai yang memiliki keahlian dalam bidang arkeologi dan sejarah, sudah seharusnya BPCB dan para ahli yang dilibatkan pemerintah dalam pembangunan PIM berperan penting dalam memberikan masukan tentang lokasi yang dijadikan tempat proyek ini. Tapi memang tidak dapat dipungkiri bahwa para ahli yang juga birokrat akan sulit untuk bersifat netral karena biasanya pandangan mereka harus sesuai dengan kepentingan pemerintah. Begitu pula dengan para ahli lain, yang dilibatkan oleh pemerintah, akan menghadapi kesulitan untuk berpikir kritis apalagi kepada pemberi proyek.

Seiring dengan kurangnya koordinasi dan tergesa-gesanya penyelesaian PIM, kontrol terhadap proses proyek ini juga kurang intensif, terutama karena tidak banyaknya pihak yang mengetahuinya proyek ini kecuali kalangan pemerintah dan para ahli yang dilibatkan. Masyarakat Trowulan sendiri mengetahui persoalan pembangunan PIM ini melalui media nasional dan lokal yang memberitakannya cukup gencar setelah kasus pembangunan ini memunculkan masalah. Dalam hal ini sudah sejak awal masyarakat tidak diikutsertakan oleh pemerintah dalam perencanaan pembangunan PIM, padahal dampak dari pembangunan PIM ini akan sangat dirasakan oleh mereka. Selain itu, pemerintah juga kurang mau mendengarkan para ahli yang dipekerjakannya, seperti terlihat dari diabaikannya saran penghentian pembangunan dari arsitek yang dari hasil surveynya di lokasi pembangunan melihat adanya situs pada lokasi penggalian. Hal yang sama juga terjadi dengan saran penghentian dari Tim evaluasi yang terdiri dari para ahli yang dibentuk oleh pemerintah sendiri. Pengabaian oleh pemerintah ini telah menimbulkan polemik yang meluas, sehingga proses pembangunan PIM tadi tidak lagi kondusif, lebih-lebih setelah

tim evaluasi yang terdiri dari para ahli tadi seolah dikesampingkan dari kedudukannya.

Pembangunan PIM yang ternyata merusak situs ini kelihatannya mengikuti pola atau tren umum, di mana beberapa pemerintah di beberapa situs arkeologi di dunia melakukan pendekatan baru dalam manajemen situs arkeologi, yaitu dengan mendirikan museum di atas situs. Konsep ini memungkinkan penelitian arkeologi oleh ahli dapat dilakukan bersamaan dengan memberi akses bagi publik. Namun konsep ini masih ditentang oleh arkeolog beraliran konvensional, yang masih beranggapan bahwa bangunan di atas reruntuhan, walaupun hanya berupa struktur temporer, akan mengakibatkan adanya elemen struktur (kolom dan pondasi) yang dapat merusak situs. Ketidaksetujuan para arkeolog di atas memang benar dan terbukti untuk kasus PIM di Trowulan ini. Meskipun demikian, para arsitek memutuskan untuk tetap mendesain PIM di lahan yang sama setelah mendapatkan referensi keilmuan (arkeologi) tentang desain bangunan di atas situs dan preseden-preseden (karya arsitektur) di luar negeri serta adanya re-view dari para arkeolog. Catatan lain dalam rencana pembangunan ini adalah saran agar seluruh situs dibuka dulu oleh arkeolog sebelum dibangun, untuk menghindari kerusakan terhadap situs penting dan mengupayakan agar pondasi bisa diletakkan di luar situs.

Informasi tentang indikasi kerusakan situs selama proses pembangunan menyebar ke beberapa pihak, dan mengakibatkan terbentuknya dua kelompok yang saling berseberangan antara pihak yang pro pembangunan dan pihak yang menolaknya. Kontestasi yang kemudian berlangsung mengenai hal ini tidak terbatas pada pertentangan antara pemerintah dengan para ahli (akademisi), tetapi juga antara kelompok-kelompok dalam pemerintahan. Di dalam pemerintahan sendiri terdapat kelompok

yang bahkan menentang keras pembangunan, sementara di kalangan para ahli (baik birokrat maupun diluar pemerintah) malah terdapat orang-orang yang mendukung pembangunan karena mungkin posisinya menjadi bagian dari proyek tersebut. Situasi pro dan kontra ini semakin kompleks, ketika media memberitakan persoalan ini kepada masyarakat luas. Dalam hal ini masyarakat disugahi informasi tentang permasalahan yang ditimbulkan akibat proses pembangunan PIM tersebut.

Pembangunan PIM, yang pada awalnya diklaim atas dasar keahlian atau kepakaran untuk manfaat yang lebih besar, akhirnya dihentikan pemerintah pada Januari 2009. Persoalan pengrusakan situs yang telah terjadi kemudian diusut lebih mendalam dengan melibatkan pihak kepolisian. Pihak kementerian yang diharuskan bertanggung jawab atas dampak pengrusakan tersebut kemudian memutasi Kepala BPCB Trowulan saat itu ke Jakarta, dengan jabatannya diturunkan selevel staff. Kementerian kemudian melakukan pengaturan baru untuk penanganan proyek ini melalui berbagai program. Diantaranya adalah yang dijalankan pada bulan Agustus sampai Desember 2009, di mana para arkeolog dari UI, UGM, dan BPCB Trowulan diminta untuk melakukan ekskavasi arkeologis untuk membuka temuan yang masih terpendam dalam tanah di lokasi pembangunan PIM. Sejalan dengan itu, pemerintah gencar membahas alternatif-alternatif pemecahan masalah melalui pertemuan-pertemuan ilmiah dengan melibatkan berbagai instansi dan para ahli. Salah satu kesepakatan yang dihasilkan adalah bahwa konsep pembangunan harus didesain ulang agar dapat disesuaikan dengan kondisi situs.

Pada bulan Desember 2009, dibentuk tim evaluasi PIM yang kedua, terdiri dari Drs. Wardiyatmo, M.Sc., Dra. Sri Rahayu Budiarti, MM., Drs. Suwandi (Pengarah); Drs. Hari Untoro

Drajat, MA (Penanggung Jawab); Prof. Dr. Mundardjito (Ketua); Drs. Soeroso MP, M.Hum. (Sekretaris); Dr. Daud Aris Tanudirjo, MA, Drs. Junus Satrio Atmojo, M.Hum., Rusli Yahya SH, Ir. Arya Abieta, Ir. Osrifoel Oesman, M.Hum., Ir. Bambang Eryudhawan, Drs. Gatot Gautama, MA, Drs. Sonny C. Wibisono DEA, dan Anam Anis, SH (Anggota). Tugas Tim Evaluasi adalah melakukan evaluasi teknis arkeologis terhadap pembangunan PIM yang sudah berjalan, menyusun konsep dan rencana Pengembangan PIM, dan menentukan langkah-langkah relokasi, rehabilitasi, dan rancang ulang pembangunan PIM di Trowulan sesuai dengan kaidah arkeologi.

Untuk menjalankan tugas merancang ulang bangunan PIM, pada Desember 2009, pemerintah menyelenggarakan sayembara masterplan dan desain pengembangan bangunan PIM. Juara pertama desain pengembangan bangunan adalah Gregorius Antar dari Jakarta dan Juara pertama Masterplan Kawasan adalah Andi Siswanto dari Semarang. Berdasarkan dari hasil Sayembara ini, pada tahun 2010 dibuat perencanaan teknis konstruksi untuk pembangunannya.

Bentuk bangunan PIM yang saat ini berdiri adalah hasil dari sayembara tersebut, namun ternyata masyarakat kurang menyukai desainnya karena dianggap tidak menarik dan kurang menyampaikan pesan simbol-simbol peradaban Majapahit.⁴⁹ Hingga saat ini proses penyelesaian proyek pembangunan PIM masih berlangsung, dan posisi-posisi kritis “kekuasaan” mungkin telah memenangkan pertarungan yang terjadi, sehingga sebagian dari pemangku kepentingan yang berposisi birokrat harus menghadapi segala putusan-putusan yang merugikan perjalanan karir mereka. Mantan Kepala BPCB Trowulan, misalnya,

⁴⁹Wawancara dengan AD (inisial) pada tanggal 26 Maret 2013.

terpaksa harus dipindahkan meskipun dia kemudian menjadi kepala BPCB di provinsi lain. Meskipun persoalannya dianggap selesai, dampak yang ditimbulkannya tetap terasa, di mana seolah telah tercipta jarak antara pemerintah pusat dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Akibat lain dari tidak terencananya program pembangunan PIM adalah lahirnya kelompok sosial atau LSM di Trowulan dan sekitarnya yang kritis terhadap kebijakan pemerintah terkait pengembangan kawasan.

Proyek PIM adalah salah satu cara pemerintah untuk mengembangkan pariwisata di Trowulan. Tetapi upaya pengembangan ini seperti mengabaikan hal-hal penting lain yang berkaitan dengan pemeliharaan situs di sini. Upaya penentuan batas-batas kawasan yang seharusnya lebih penting, misalnya, seperti diabaikan begitu saja. Perspektif perlindungan sendiri dan makna dasarnya telah berubah dan seolah digantikan dengan perspektif kepentingan pariwisata. Semenjak kebudayaan bergabung dengan pariwisata, kebudayaan akhirnya menjadi semacam komoditas untuk menghasilkan devisa negara, sementara unsur perlindungan terhadapnya yang menjadi bagian dari pelestarian telah dimaknai sebagai usaha ekskavasi saja. Dalam masalah warisan budaya seharusnya perlindungan itu dilakukan secara berdsamaan dengan pemanfaatannya. Dalam konteks Trowulan, apabila batas-batas kawasan sudah jelas melalui kajian akademis, upaya-upaya perlindungan dan pemanfaatan dapat berjalan secara bersama-sama.

BAB 4

RUANG KONTESTASI

Upaya-upaya pelestarian situs Majapahit oleh pemerintah telah menuai respon positif dari sebagian masyarakat. Mereka adalah para pemangku kepentingan yang mempunyai motif berbeda dalam mendukung upaya tersebut. Bahkan sebagian dari mereka bersikap lebih dari sekedar mendukung upaya pelestarian, tetapi berharap hadirnya kembali Majapahit itu sendiri. Meskipun demikian, selain mereka yang setuju terdapat juga dalam masyarakat Trowulan dan Mojokerto kalangan yang ragu-ragu dalam mendukung upaya pelestarian tersebut, karena pelestarian dimaksud telah ditumpangi oleh motif-motif kepentingan tertentu. Dengan demikian, di dalam proses dan upaya pelestarian situs Majapahit ini terdapat kontestasi dengan beragam motif yang berbeda yang bahkan bisa memunculkan konflik jika tidak dikelola dengan bijaksana.

Di luar kuatnya yang mendukung dan adanya yang ragu-ragu atau bahkan hadirnya mereka yang tidak mendukung, upaya-upaya pelestarian yang telah menjadi isu nasional ini telah mengundang hadirnya beragam *stakeholders*. Dengan kepentingan yang berbeda, para *stakeholders* ini kemudian ikut berkiprah dalam medan pelestarian situs Majapahit yang ada. Di antara mereka terdapat orang atau kelompok yang memang secara tulus ingin melakukan pelestarian semata-mata untuk kepentingan kebudayaan. Tetapi ada juga dari mereka orang atau kelompok yang keterlibatannya bermotifkan ekonomi, dengan mata situs dijadikan sebagai medan yang mendatangkan keuntungan material. Selain itu, ada juga kelompok yang terlibat dalam medan pelestarian ini karena punya motif agama atau

ingin melestarikan nilai-nilai agama yang melekat dalam warisan budaya yang ada.

4.1. Komplek Ziarah Makam Troloyo

Terletak di Dusun Sidodadi, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Komplek Makam Troloyo tak henti-hentinya didatangi oleh peziarah sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu. Menurut cerita rakyat, Troloyo dulunya adalah hutan yang dijadikan tempat peristirahatan bagi pedagang Islam. Tujuan dari para pedagang adalah menyebarkan agama Islam kepada Raja Majapahit, yang saat itu bergelar Prabu Brawijaya V dan para pengikutnya. Di hutan Troloyo ini kemudian dibuat petilasan untuk menandai peristiwa itu. Troloyo atau “Tralaya” berasal dari kata “setra” dan “pralaya”. “Setra” berarti tegal atau tanah lapang tempat pembuangan *mayat*, sedangkan “pralaya” berarti rusak atau mati.

Komplek Makam Troloyo telah mendapatkan perhatian para peneliti kolonial mulai akhir abad ke-19. P.J. Veth, adalah peneliti yang pertama kali mengkaji tentang makam Troloyo dan hasilnya diterbitkan pada tahun 1878 dalam buku *Java II*. Penelitian dilanjutkan oleh L.C. Damais, seorang sarjana asal Perancis, dan hasil penelitiannya dituangkan dalam tulisan “*Etudes Javanaises I. Les Tombes Musulmanes datees de Tralaya*” yang dimuat di *BEFEO (Bulletin de Ecole francaise D’extrement-Orient). Tome XLVII Fas. 2. 1957*. Damais mendapatkan data bahwa angka tahun tertua yang terdapat di Makam Troloyo berasal dari abad ke-14 sedangkan angka tahun termuda berasal dari abad ke-16.⁵⁰

⁵⁰Data dari BPCB Jawa Timur.

Setelah kemerdekaan, para peneliti dari Indonesia melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh peneliti kolonial. Mereka melakukan penelitian arkeologi keberadaan Komplek Makam Troloyo. Hasil-hasil penelitian mengerucut pada suatu kesimpulan bahwa Komplek Makam Troloyo adalah suatu lokasi di mana ditemukan jejak-jejak komunitas Islam pada masa Majapahit. Salah satu bukti yang memperkuat hipotesis itu adalah penemuan nisan yang bertuliskan nama Islam “*Zainudin*”. Lepas dari kurang jelasnya tentang siapa saja yang berada di kompleks makam Troloyo ini, para peneliti dan masyarakat berpandangan sama bahwa makam tersebut adalah tempat para tokoh Islam disemayamkan. Dari yang bisa diidentifikasi sesuai dengan yang tertulis pada nisan di pemakaman tersebut, pada makam utama terdapat makam Syekh Jumadil Kubro, Syekh Abdul Qodir Jailani Sini, Syekh Maulana Skah, dan Syekh Maulana Ibrahim. Pada tempat lain masih di Komplek Makam Troloyo, ditemui Petilasan Walisongo, Makam Sunan Ngudung, Makam Putri Kencono Wungu, dan Anjasmoro. Di lokasi yang agak berjauhan ditemukan tujuh buah makam yang dikenal dengan nama Makam Tujuh.

Menurut para peneliti, hanya makam tujuh lah yang merupakan sisa peninggalan masa Majapahit. Meskipun demikian, masyarakat pada umumnya bahwa di dalam makam tersebut terkubur para tokoh dan ulama atau para wali Islam, yang mungkin hidup pada masa Majapahit akhir. Karena kepercayaan inilah, mereka melakukan ziarah dan berdoa pada makam Troloyo ini. Keyakinan mereka merupakan sebuah bentuk proses panjang di mana nilai-nilai tradisional, nilai-nilai Jawa yang menggabungkan antara mitos dan agama menjadi sebuah landasan mengkonstruksi makam-makam di Troloyo ini. Dari sekian makam yang ada, makam Tujuh yang sebenarnya

peninggalan Majapahit yang dibuktikan dengan simbol Surya Majapahit dan kaligrafi Islam yang terukir di nisannya, memang terlihat sepi pengunjung dibandingkan dengan makam-makam lain. Berziarah ke makam memang bukan soal apakah makam tersebut berasal pada jaman Majapahit atau bukan. Berziarah sangat berkaitan dengan siapa yang terkubur di dalam makam tersebut.

Apa yang cukup penting berkaitan dengan makam-makam di Troloyo adalah terjadinya proses konstruksi identitas oleh individu atau kelompok terhadapnya. Makam Troloyo konon menjadi populer sebagai tempat ziarah setelah didatangi oleh seorang tokoh nasional sekaligus tokoh agama yang kebetulan saat itu menjabat Presiden, yaitu Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur.⁵¹ Mayoritas pengunjung Komplek Makam Troloyo berasal dari luar Trowulan, seperti Surabaya, Malang, Gresik, atau Jombang, termasuk dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Pengunjung bukan hanya berasal dari masyarakat biasa, namun juga pejabat-pejabat tinggi di pemerintahan. Komplek Makam Troloyo makin ramai pada hari-hari tertentu seperti saat malam Jum'at Legi, ketika berlangsung kegiatan haul Syekh Jumadil Qubro, acara Gerebeg Suro, bulan puasa, dan bulan besar kalender hijriah. Upacara-upacara adat banyak dilakukan di Komplek Makam Troloyo oleh masyarakat.

Gus Dur mengkonstruksi sejarah keberadaan makam-makam di Troloyo dengan mengkaitkannya dengan sejarah perkembangan Islam. Memang benar bahwa pada saat akhir kekuasaan Majapahit, Islam juga telah hadir di kerajaan itu. Kehadiran Islam pasti dibawa oleh para pendakwahnya, yaitu para ulama atau juga

⁵¹Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada tanggal 20 Oktober 1999 dan berakhir pada 23 Juli 2001.

wali. Karenanya, bukan mustahil bahwa makam-makam di Troloyo adalah tempat para tokoh Islam di kuburkan, termasuk mereka yang hidup di jaman Majapahit, seperti dibuktikan oleh adanya simbol Majapahit pada nisan yang ada di sana. Di antara yang penting di sana adalah makamnya Syekh Abdul Qodir, yang konon diyakini Gus Dur sebagai salah seorang panglima perang yang menggulingkan Kerajaan Majapahit dan ikut mendirikan Kerajaan Demak.

Identifikasi terhadap makam ini cukup penting bagi masyarakat Trowulan sekarang. Adanya pengakuan dari Gus Dur bahwa asal usulnya punya keterkaitan dengan Troloyo, di mana konon Gus Dur meyakini bahwa dirinya merupakan keturunan dari Syekh Abdul Qodir dengan nama aslinya Tan Kim Han, telah membentangkan ikatan spiritual bagi masyarakat bahwa Islam yang ada di Troloyo adalah bagian dari kehidupan masyarakat Trowulan. Itulah sebabnya masyarakat Trowulan dan masyarakat Islam di Jawa Timur terus memelihara makam Troloyo ini dan setiap saat mengadakan ritual do'a di sana. Itu pula sebabnya masyarakat meyakini bahwa Komunitas Islam di Troloyo adalah mereka yang berhasil meruntuhkan kekuasaan Majapahit.

Setelah Gus Dur berkunjung ke Troloyo dan membangun identitas dirinya, makam tokoh-tokoh Islam yang ada di sana telah menarik masyarakat untuk mengunjunginya. Tetapi memang dalam kenyataannya harus diakui bahwa masyarakat yang berkunjung ke Troloyo ini mungkin mempunyai tujuan yang beragam. Meskipun demikian, tentunya mayoritas mereka adalah berkunjung dengan maksud berziarah, yakni melakukan do'a dan dengan membaca ayat-ayat Qur'an. Selain kelompok ini terdapat juga pengunjung dengan maksud sekedar ingin tahu makam Troloyo sebagai bagian dari wisata mereka ke Trowulan.

Kelompok lainnya adalah mereka yang datang untuk mendapat ilmu relijius dari para leluhur yang berada di makam itu.

Makam Troloyo akhirnya menjadi tempat ziarah yang dikunjungi ribuan orang. Dalam satu bulan tidak kurang dari 2 juta orang yang berkunjung ke makam yang terdapat di dalamnya. Dari sisi pemeliharaan warisan budaya, makam Troloyo telah berhasil menghidupkan pariwisata. Meskipun religius, wisata ini berhasil memberi manfaat kepada masyarakat Troloyo. Menurut kepala desa di sana, terdapat sekitar 200 lapak yang menjual berbagai dagangan. Karena didatangi oleh ratusan ribu orang, maka banyak stake holder yang terlibat dalam pengelolaan makam Troloyo, termasuk yang non-religius. Di sana ada pengelola makam, dinas-dinas pemerintah dan juga masyarakat pedagang serta masyarakat penziarah yang mempunyai kepentingan dengan makam di sana.

Keberhasilan ini kelihatannya memang by design. Gus Dur hanyalah medium yang memberikan identitas dan sekaligus justifikasi keberadaan makam tersebut, di luar kepentingan dirinya untuk mengidentifikasi sebagai bagian dari Troloyo. Menurut kades Sentonorejo, dia ikut andil dalam mengembangkan Komplek Makam Troloyo menjadi salah satu pusat kunjungan wisata ziarah di Trowulan, bahkan Jawa Timur. Dia pada awalnya menyusun strategi pemasaran dengan mengundang berbagai tokoh ulama yang memiliki massa pendukung yang besar, seperti kyai-kyai pemimpin tarekat dan terakhir mengundang Gus Dur. Dengan kata lain, Gus Dur jugalah yang ikut mengembangkan wisata di Komplek Makam Troloyo ini, karena dengan kharismanya sebagai pemimpin umat dia juga memberikan justifikasi tentang benarnya bahkan besarnya para wali yang dikubur di dalam makam tersebut. Dengan demikian, lepas dari belum bisa dipastikan kebenarannya secara ilmiah,

legitimasi dan justifikasi Gus Dur telah menarik keinginan masyarakat untuk menjadi bagian dari sejarah tersebut.

Pada awalnya Komplek Makam Troloyo sepenuhnya menjadi area penelitian dibawah koordinasi BPCB (saat itu BP3) Trowulan. Seperti dikatakan oleh informan dari BPCB Trowulan, di lokasi Komplek Makam Troloyo ini memang ditemukan peninggalan Majapahit berupa kanal-kanal. Namun, karena struktur-struktur kanal itu tidak utuh dan mayoritasnya telah hancur, BPCB merasa tidak perlu lagi terlibat dalam pengelolaan di Makam Troloyo. Karenanya, Makam Troloyo ini kemudian dikelola oleh Disporabudpar Kabupaten Mojokerto dan Kepala Desa Sentonorejo. Berbeda dengan sikap BPCB, seorang informan menganggap bahwa Makam Troloyo seharusnya dibawah pengelolaan BPCB Trowulan karena sisa-sisa struktur di bawah lahan kompleks masih penting sebagai data arkeologi. Meskipun demikian, BPCB masih terus mengkoordinasikan pengelolaan Makam Tujuh, karena secara ilmiah warisan budaya ini dapat dibuktikan sebagai peninggalan Majapahit.

Disporabudpar Kabupaten Mojokerto memanfaatkan peluang keberadaan Komplek Makam Troloyo ini. Sejarah, tradisi dan kepercayaan masyarakat yang terbentuk di makam-makam itu menjadi sebuah produk destinasi wisata religi unggulan di Trowulan. Instansi itu mulai menambah fasilitas-fasilitas bangunan baru untuk memberikan estetika dan kenyamanan bagi pengunjung, termasuk membangun lorong beratap, mengganti nisan-nisan dengan bahan keramik serta membangun lahan parkir di depan kompleks makam meskipun pembangunan yang terakhir ini mendapat tentangan dari sebagian kalangan arkeolog, mengingat hal itu dapat merusak struktur-struktur peninggalan Majapahit yang ada di bawahnya.

Banyaknya peziarah yang berkunjung ke Komplek Makam Troloyo membawa keuntungan bagi masyarakat sekitar. Pendapatan ekonomi mereka bertambah dengan bekerja sebagai pedagang kaki lima di sekitar kompleks makam. Sebagai produk yang menjadi destinasi wisata unggulan di Trowulan, Makam Troloyo telah melahirkan kompleksitas dalam pengelolaan, menghadirkan banyak kepentingan, dan menyulitkan manajemen pengembangannya. Dalam hal ini Komplek Makam Troloyo telah dipercaya oleh masyarakat sebagai ruang yang memiliki nilai spiritual tinggi, menyatu dengan tradisi dengan menitikberatkan pada keterikatan pada leluhur, meskipun terasa agak meninggalkan nilai-nilai historis yang seharusnya bertumpu pada sumber-sumber ilmiah.

4.2. Siti Hinggil

Siti Hinggil adalah salah satu situs di Trowulan yang berada di Dusun Kedungwulan, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan. Siti Hinggil yang diartikan tanah tinggi, berhubungan dengan tanah yang diagungkan yang terletak di dekat lokasi Candi Brahu. Masyarakat Jawa yang biasa disebut beraliran kepercayaan meyakini bahwa Siti Hinggil pernah menjadi tempat pertapaan Raden Wijaya dan mereka bahkan mengidentifikasinya sebagai makam Raja Majapahit pertama tersebut. Siti Hinggil termasuk situs yang ramai dikunjungi oleh masyarakat, terlebih lagi pada waktu malam Jum'at Legi dan bulan Suro.

Situs Siti Hinggil dikelola oleh masyarakat setempat, terutama oleh kepala desa (informasi terakhir Siti Hinggil sudah dialihkan pengelolaannya ke Disporabudpar Kabupaten Mojokerto). Pengelolaan seperti ini, dan bukannya oleh BPCB Trowulan, tentu saja memunculkan pertanyaan mengingat tempat ini dianggap sebagai bagian dari situs Kerajaan Majapahit. Sebagai

bagian dari kawasan peninggalan Majapahit di Trowulan, Siti Hinggil pada mulanya teridentifikasi sebagai sebuah bangunan candi. Para paneliti dari BPCB Trowulan dan akademisi telah terlibat dalam identifikasi tersebut. Siti Hinggil dikenal setelah masyarakat menemukan tengkorak dan kerangka manusia yang dipercaya oleh mereka sebagai bekas jasad Raden Wijaya (Kajian Integratif, 2008, hlm. 247). Anggapan ini tentu saja bertentangan dengan kenyataan bahwa Raden Wijaya adalah Raja Hindu yang jasadnya dibakar apabila meninggal dunia, seperti pada upacara Ngaben di Bali.

Keyakinan masyarakat tentang Siti Hinggil sebagai makam Raden Wijaya menimbulkan aroma mistis di situs tersebut. Dengan mengabaikan logika di atas, sebagian masyarakat berkunjung ke Siti Hinggil untuk kepentingan spiritualnya, termasuk dalam hal ini para pejabat pemerintahan (era Orde baru) dan tokoh masyarakat yang menganut kejawen. Mereka datang ke Siti Hinggil untuk meminta petunjuk dan praktek-praktek ritual sejenisnya. Di sekitar situs ini memang terdapat makam-makam yang dianggap leluhur oleh masyarakat. Sebagai makam orang-orang keturunan Majapahit, masyarakat yang mendatanginya memang tidak hanya memberikan penghormatan tetapi juga memberikan doa yang diharapkan membawa keberkahan bagi yang mendoakannya.

Dengan nilai penting yang melekat padanya, Siti Hinggil kemudian seolah menjadi milik masyarakat tertentu. BPCB Trowulan yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keberadaan situs ini malah menyerahkan pengelolaannya kepada masyarakat. Dengan kenyataan seperti itu, Siti Hinggil yang dianggap mempunyai nilai spiritual tinggi akhirnya dibangun oleh masyarakat. Para pejabat yang datang ke sana sebagai pribadi atau mereka yang punya hajat tertentu biasa memberikan

bantuan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas di sekitar situs ini. Menurut Juru Pelihara situs ini, sebagian besar bangunan baru yang mengelilingi situs berasal dari bantuan dana para pejabat pemerintah. Hingga kini, biaya untuk perawatan bangunan dapat tertutupi dari tamu-tamu negara dan masyarakat umum yang berkunjung ke sana.⁵²

Sayangnya penambahan fasilitas di Siti Hinggil lebih mengedepankan aspek mistis dan ritual daripada aspek pelestariannya. Di atas situs, misalnya, didirikan sebuah bangunan berbentuk petilasan yang juga terdapat makam-makam di dalamnya. Pohon besar yang tumbuh di atas situs masih dibiarkan tumbuh, padahal akarnya menembus dan merusak konstruksi yang ada di bawahnya. Pohon tersebut dibiarkan tumbuh karena keberadaannya mengandung nilai sakral yang besar dalam pandangan para peziarah dan pelaku ritual. Banyak kepercayaan yang muncul dari anggapan kesakralan pohon tersebut, yang membuat pohon itu kemungkinan besar tetap dipelihara. Besarnya nilai spiritual dan mistis Siti Hinggil ini membuka akses seluas-luasnya kepada pengunjung yang ingin melakukan ritual dan ziarah.⁵³

Sebagai sebuah situs yang mengandung nilai-nilai sejarah dan arkeologi, keberadaan Siti Hinggil tetap penting bagi para peneliti. Namun, pengambilalihan makna ruang dalam proses pemeliharannya baik sengaja maupun tidak disengaja oleh masyarakat, melahirkan kondisi yang tentunya menyulitkan para

⁵²Wawancara dengan KP (inisial) tahun 2012.

⁵³Juru pelihara Siti Hinggil membedakan pengertian antara ziarah dan ritual. Pemaknaan ziarah diberikan kepada mereka yang biasanya bersama-sama datang ke makam atau tempat spritiual dengan dipimpin satu orang yang dipercaya. Sedangkan ritual adalah kegiatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa dipimpin oleh siapapun dengan tujuan meminta petunjuk.

ilmuwan yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut. Situs ini memang menjadi situs yang seolah masih berfungsi, yakni bukan hanya situs peninggalan atau warisan budaya yang menjadi objek wisata, melainkan yang masih digunakan oleh masyarakat. Tetapi pengelolaannya oleh masyarakat dan bukan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap situs tersebut, memunculkan masalah tersendiri, seperti sulitnya para peneliti menggali data tentang situs itu.

4.3. Pura Majapahit Pak Suryo

Setelah diyakini sebagai peninggalan Majapahit, Trowulan berubah menjadi ruang yang tidak hanya memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, namun juga nilai-nilai spiritual. Karenanya, beberapa pihak mencoba memanfaatkan lahan Trowulan untuk berbagai kepentingannya, termasuk sebagai lokasi untuk mendirikan tempat ibadah. Seseorang yang berasal dari Kediri, misalnya, mencoba mendirikan pura di sekitar kolam segaran. Orang yang bernama Suryo ini merasa sebagai keturunan Majapahit dan bahkan sebagai Raja Majapahit ke X.

Merasa sebagai keturunan Raja Majapahit terakhir, Suryo berusaha memperjelas eksistensinya dengan membangun sebuah pura di Trowulan, karena daerah itu merupakan peninggalan Majapahit. Dia mengajarkan agama Majapahit di pura nya sebagai upaya untuk menghidupkan kembali budaya Majapahit pada umumnya, di samping untuk kepentingan pribadi dia sebagai pengklaim Raja majapahit. Dia meyakini bahwa pada masa Majapahit sudah berkembang toleransi antar umat beragama, di mana semua masyarakat hidup berdampingan satu sama lain. Dia mencoba untuk menyebarkan nilai-nilai Majapahit untuk diinternalisir oleh masyarakat sekarang, dan itulah yang dia namakan sebagai agama Majapahit. Selain itu, dia juga

mengungkap sejarah Majapahit dalam versi yang berbeda dengan sejarah yang berasal dari para akademisi.

Keyakinan dan upaya Suryo ini ternyata banyak mendapat tentangan dari masyarakat sekitar. Penentangan ini di samping karena Suryo mengungkap ajaran-ajaran tradisional Jawa juga karena dia berusaha mendirikan pura yang telah diprotes oleh kalangan Islam di sana. Dengan demikian, upaya Suryo ini telah memunculkan konflik dan kegaduhan dalam masyarakat sejak kedatangannya di Trowulan pada tahun 1997. Beberapa kali masyarakat melakukan protes kepada Suryo, karena pendirian pura tadi tidak berdasarkan ketentuan pendirian tempat ibadah (SKB tiga menteri). Selain itu, apa yang juga penting adalah bahwa ajaran Suryo, yang disebut sebagai agama Majapahit itu, identik dengan ajaran agama Hindu, yang tentu saja dianggap sebagai penyebaran agama di luar masyarakat penganutnya.

Melalui negosiasi dengan masyarakat sekitar dan pemuka agama, akhirnya tercapai sebuah kesepakatan yang didapat antara kedua belah pihak yaitu Pura Majapahit tetap diperbolehkan berdiri asal jangan dibuka untuk umum. Keberadaan pura dapat diterima apabila tidak ada umat yang menggunakannya, terutama dari luar Trowulan. Sampai saat ini, pura masih berdiri walaupun sudah jarang pengunjung yang datang. Pura memang sudah ditutup sebagai tempat ibadah umum, dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu yang kemungkinan kerabat dari Suryo, yang sampai saat ini dibantu oleh 3 orang anak buahnya untuk mengurus Pura Majapahit⁵⁴ yang dia bangun.

⁵⁴Wawancara dengan Romo RSG (inisial) pada tanggal 27 Juni 2012. Ia diberikan kepercayaan oleh Suryo untuk mengurus Pura Majapahit yang terletak di Trowulan. Romo berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Dia terlibat dalam kepengurusan sejak Pura Majapahit berdiri hingga saat ini. Selain itu, ada juga pegawai Suryo yang lain bernama Aam asal Surabaya, yang baru satu

Menurut pembantunya, Suryo sangatlah sibuk dengan kegiatannya, karena dia juga dipanggil kemana-mana untuk mengajarkan keyakinannya.⁵⁵ Ajaran Suryo sendiri konon diambil dari mana-mana yang tidak berdasar pada keyakinan satu agama saja, yang karenanya dia juga konon membolehkan semua keyakinan dapat masuk ke dalam Pura Majapahit, karena pura ini juga melambangkan kemajapahitan, yang dimaksudkan untuk persatuan berbagai pemeluk agama dan keyakinan. Dari upayanya yang terus menerus, memang terdapat juga orang-orang yang beraliran kepercayaan yang seolah memberikan dukungan terhadap Suryo. Setidaknya 3 orang yang menjadi pembantunya adalah mereka yang memberikan dukungan terang-terangan terhadapnya.

Seperti sudah disebutkan di atas, gaung Majapahit melalui rencana pemereintah untuk memelihara situsnya telah menarik orang-orang untuk datang ke Trowulan sebagai tempat di mana Majapahit berada. Suryo adalah salah seorang saja yang merasa sebagai bagian dari Majapahit yang menganggap dirinya berhak bukan hanya untuk tinggal di Trowulan melainkan juga mengembangkan ajaran yang dulunya dianggapnya menjadi dasar religius kerajaan Majapahit. Dengan kata lain, dengan menguatnya gaung Majapahit setelah Trowulan ditemukan, orang-orang seperti Suryo seolah mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam ruang yang bergaung tersebut, menjadi bagian dari mereka yang berada di dalamnya dan bahkan ikut merekonstruksi sejarah Majapahit sendiri. Apa yang mereka

tahun lebih bekerja di pura tersebut. Suryo sendiri sulit sekali ditemui karena dia memiliki tempat tinggal tidak hanya di Trowulan, dan dia juga lebih sering menetap di Bali, di mana dia juga memiliki pura di sini.

⁵⁵Menurut Suryo, ditutupnya Pura Majapahit membawa hikmah tersendiri bagi dirinya, yang kemudian kerap diundang ke luar daerah di Indonesia bahkan ke luar negeri (Surat Kabar Warta Bali, 5 Februari 2003).

lakukan sampai saat ini nampaknya berjalan dengan baik, karena mereka telah menjadi bagian dari kelompok-kelompok yang eksis di sana. Sebagai tempat di mana situs Majapahit berada, Trowulan akhirnya menjadi ruang terbuka bagi siapa saja yang punya kepentingan baik dengan mengatas namakan kepentingan Majapahit, atau secara tersembunyi untuk mendapatkan keuntungan dari situs Majapahit serta mengeksploitasi warisan budaya Majapahit yang ada di sekitar Trowulan.

4.4. Pabrik Baja

Berselang kurang lebih lima tahun sejak Trowulan menjadi isu nasional karena kasus pendirian Pusat Informasi Majapahit (PIM) yang ternyata berdampak pada pengrusakan situs, kini Trowulan kembali menghadapi persoalan. Sekitar awal bulan Juli 2013, sejumlah warga berunjuk rasa di sekitar lahan seluas 3,6 hektar yang berada di Kecamatan Trowulan. Masyarakat menuntut penghentian rencana pembangunan pabrik baja yang berlokasi di pinggir jalan Surabaya – Madiun, tepatnya di Desa Jati Pasar dan Desa Wates Umpak, tak jauh dari kawasan Trowulan. Alasan tuntutan penghentian tersebut karena lokasi pabrik tersebut berdekatan dengan peninggalan situs Wringin Lawang dan Candi Wates Umpak sebagai kawasan warisan budaya.

Masyarakat mengetahui rencana pembangunan pabrik baja tersebut setelah pihak perusahaan (PT Manunggal Sentral Baja) melakukan sosialisasi terhadap mereka. Saat itu, izin mendirikan bangunan (IMB) sudah dikeluarkan dengan berdasarkan pada izin dari Bupati Mojokerto.⁵⁶ Masyarakat menyangkan pihak perusahaan melangkahi (tidak meminta pertimbangan terlebih

⁵⁶Bappeda Kabupaten Mojokerto: Kami Tak Sembrono. <http://surabaya.tribunnews.com/> 2013/07/19/bappeda-kabupaten-mojokerto-kami-tak-sembrono Didownload pada tanggal 15 September 2013.

dahulu) mereka dengan tidak menanyakan persetujuan mereka terhadap pendirian pabrik tersebut. Masyarakat juga mempertanyakan alasan Bupati Mojokerto merekomendasikan izin pendirian pabrik baja tersebut, padahal lokasi bagi pendirian pabrik ini berada di kawasan yang sarat dengan sisa-sisa peninggalan Majapahit.

Pihak perusahaan berdalih bahwa proyek pendirian pabrik telah mendapatkan rekomendasi dari pakar arkeologi dari BPCB Trowulan yang menyatakan bahwa di lokasi pendirian tidak ada peninggalan situs. Namun, dalih tersebut kelihatannya hanya akal-akalan mereka karena pihak BPCB Trowulan sendiri ternyata membantahnya. Pihak BPCB tidak merasa pernah memberikan rekomendasi berkaitan dengan pendirian perusahaan. Apa yang mereka lakukan hanyalah memberikan informasi tentang status pabrik lama yang pernah mau dibangun di lokasi tersebut.⁵⁷

Setelah sosialisasi berakhir, masyarakat tetap menolak pendirian pabrik baja tersebut, namun, pada sisi lain, pihak perusahaan juga tetap bersikukuh untuk melanjutkan pendiriannya. Berbagai strategi pun telah dilancarkan oleh pihak perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan masyarakat Trowulan. Upaya ini nampak berhasil, karena dalam jangka waktu relatif singkat, sebagian besar aparat desa Jati Pasar (sekitar 90% lahan pabrik baja berada di kawasan desa ini) telah mendukung proyek pendirian pabrik tersebut. Perusahaan telah memberikan semacam kompensasi materi dan lainnya kepada masyarakat yang mendukung mereka.⁵⁸ Namun demikian, kompensasi ini tidak

⁵⁷Pembangunan Pabrik Baja di Trowulan dihentikan. <http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/07/pembangunan-pabrik-baja-di-trowulan-dihentikan> Didownload pada tanggal 15 September 2013.

⁵⁸Wawancara dengan AN (inisial) pada tanggal 15 September 2013.

berhasil dengan baik ketika diberikan kepada masyarakat dusun Jati Sumber, desa Wates Umpak (sekitar 10% lahan pabrik baja berada di kawasan ini), karena sebagian masyarakat disana tetap menolak pendirian pabrik tersebut.

Perbedaan sikap ini memang mencuat ke permukaan dan menjadi isu di Jawa Timur, karena banyak kalangan telah ikut terlibat dalam pro dan kontra mengenai pendirian pabrik ini. Meskipun demikian, pihak perusahaan tetap bersikukuh untuk melanjutkan rencananya. Dalam upayanya untuk mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, mereka berjanji untuk melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja di pabrik tersebut. Sebagian masyarakat tetap menolak rencana tersebut karena mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, sementara keahlian mereka sebagai pengrajin patung, terakota, ataupun seniman jelas tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan diberikan perusahaan. Selain itu, mereka juga pasti akan ditempatkan pada posisi-posisi rendah dalam pabrik, mengingat pendidikan mereka tidak memadai.

Penolakan masyarakat pada umumnya telah diperlihatkan melalui cara-cara unjuk rasa di depan lokasi pembangunan pabrik. Unjuk rasa ini memang tindakan strategis karena dengan demikian masyarakat luas mengetahui persoalan yang telah menimpa Trowulan saat itu. Seperti biasanya, dalam melancarkan aksinya, masyarakat didukung oleh beberapa LSM yang peduli dengan warisan budaya Trowulan.⁵⁹ Setelah pemberitaan terhadap persoalan ini makin gencar, pertentangan yang timbul kemudian menjadi tidak hanya antara pihak

⁵⁹Bahkan anggota DPR ikut prihatin atas peristiwa ini dan menyempatkan diri datang ke Trowulan. Lihat <http://www.tribunnews.com/regional/2013/09/12/komisi-x-dpr-kunjungi-trowulan-dukung-cagar-budaya> Didownload pada tanggal 15 September 2013.

perusahaan dengan masyarakat Trowulan, tetapi juga dengan pihak-pihak lain yang sebagian besar memberikan dukungan kepada masyarakat.

Pertanyaan yang kemudian berkembang di tengah-tengah perdebatan adalah mengapa perusahaan begitu bersikukuh untuk mendirikan bangunan di Trowulan. Pihak perusahaan sendiri berdalih bahwa pada tahun 1970-an pernah berdiri sebuah pabrik di lokasi yang sama, sehingga menurut mereka pendirian pabrik sekarang ini hanya melanjutkan saja dan seharusnya tidak menjadi persoalan. Dalih ini seperti diperkuat oleh data dukung dari Kepala BPCB Trowulan, yang menyatakan bahwa di atas lahan tersebut pernah dibangun pabrik milik PT Pembangkit Ekonomi Desa yang sudah sejak tahun 1970-an bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian.⁶⁰ Meskipun demikian, kenyataan itu bagi masyarakat, khususnya Dusun Jati Sumber, bukanlah justifikasi kuat untuk pendirian pabrik baru di lokasi yang sama. Dalam pandangan masyarakat, bangunan yang pernah berdiri tahun 1970-an itu belum bisa dikatakan sebagai sebuah pabrik karena skalanya tidak besar. Selain itu, jenis usahanya pun tidak menghasilkan limbah, yang berbeda dengan usaha pabrik baja⁶¹ yang dapat mencemarkan lingkungan.

Alasan lingkungan tadi kelihatannya telah mendorong pemerintah - melalui BPCB Trowulan - untuk mengecek kembali melalui bantuan sejumlah ahli apakah ada temuan situs atau tidak di lahan pendirian pabrik tadi. Cara ini dianggap pemerintah sebagai salah satu jalan tengah untuk mengatasi persoalan yang berkembang luas di Trowulan. Hasil ekskavasi diharapkan dapat

⁶⁰*Situs Trowulan jadi Pabrik Baja.* <http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/07/situs-trowulan-jadi-pabrik-baja> Didownload pada tanggal 15 September 2013.

⁶¹Wawancara dengan RD (inisial) pada tanggal 15 September 2013.

menjadi salah satu rekomendasi mengenai boleh tidaknya pendirian pabrik di wilayah Trowulan. Tapi bagi masyarakat, cara pemerintah ini tidak mendukung mereka, karena apabila tidak ditemukan situs, maka hal ini dapat menjadi justifikasi bagi perusahaan atau kelompok yang pro untuk tetap mendirikan pabrik baja.

Rencana pembangunan pabrik baja di Trowulan memang menjadi persoalan serius, mengingat hal itu akan merusak lingkungan. Selain itu, mungkin juga hal itu tidak memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Memang kualifikasi kemampuan masyarakat tidak memadai untuk masuk ke dalam posisi-posisi di pabrik, tetapi apa yang lebih penting adalah bahwa pabrik baja memang berada di luar visi masyarakat dalam hal pembangunan Trowulan pada umumnya. Selama ini keahlian masyarakat lebih berorientasi pada atau berkaitan dengan kondisi Trowulan sebagai wilayah yang penuh dengan warisan atau cagar budaya. Oleh karenanya, sejauh ini mereka lebih memperkuat keahlian sebagai pengrajin, selain sebagai mata pencaharian bagi kehidupan mereka, juga sebagai upaya untuk menjaga tradisi orang tua (nenek moyang) mereka. Orang-orang Majapahit adalah pengrajin yang handal, seperti terbukti melalui temuan arkeologi di Trowulan. Meskipun sulit untuk membuktikan bahwa mereka adalah keturunan langsung dari orang-orang Majapahit, sebagian masyarakat Trowulan meyakini hal itu. Oleh karenanya, bagi mereka, menghidupkan kembali nilai-nilai Majapahit melalui simbol-simbol yang tersirat dalam hasil-hasil karya mereka adalah suatu bentuk pelestarian budaya mereka.

Dengan pandangan seperti itu, masyarakat melihat berkembangnya kesenian yang identik dengan Majapahit adalah bentuk lain dari pelestarian nilai-nilai nenek moyang mereka. Banyaknya kelompok kesenian yang berkembang di Trowulan dan

sekitarnya, yang menggunakan lokasi pementasan mereka di situs-situs Trowulan, adalah ditujukan untuk membangun sebuah identitas dan melakukan pewarisan nilai-nilai yang dulu pernah berkembang pada masa Majapahit. Arah dan kecenderungan ini tentu saja akan terganggu karena pembangunan pabrik baja dengan skala besar tentunya tidak sesuai atau tidak serasi dengan aktivitas-aktivitas mereka.⁶² Bagi masyarakat, kondisi ini tidak akan menghidupkan kembali ciri khas dari Trowulan sebagai warisan budaya Majapahit, suatu sikap yang berangkat dari kearifan yang sejauh ini tidak dipedulikan oleh perusahaan saat berhadapan dengan masyarakat Trowulan. Dalam konteks yang lebih luas, kearifan ini juga kurang diperhatikan oleh pemerintah ketika mengatur masyarakat di kawasan tersebut.

Pihak-pihak yang merasa melindungi Trowulan lantas membuat petisi “jangan rusak Trowulan, tolak pabrik baja, tetapkan cagar budaya”. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menanggapi secara ringkas petisi tersebut melalui beberapa poin. Yang menarik adalah poin kedua dari tanggapan tersebut:

“Rekomendasi dari Tim Ahli Nasional Cagar Budaya sebagai bagian dari proses penetapan Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional telah disusun (amanat

⁶²Dalam salah satu aksi unjuk rasanya, masyarakat menampilkan teatrikal yang menggambarkan rakyat jelata yang setia pada kerajaan, namun kehidupan makmur mereka diresahkan oleh pendatang, yakni pemilik PT Sentral Manunggal Baja, Sundoro Sasongko. Masyarakat yang resah lantas mengadu ke kerajaan. Patih Gajah Mada yang diutus kerajaan, segera membawa kereta kencana dan bala tentara ke lokasi pembangunan pabrik. Patih tersohor ini mengamuk dan seolah menggagalkan pembangunan pabrik itu. Lihat <http://news.detik.com/read/2013/07/19/141855/2308075/475/pembangunan-pabrik-baja-di-area-situs-majapahit-didemo> didownload pada tanggal 15 September 2013.

dari UU RI No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Rekomendasi tersebut akan dijadikan dasar oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menetapkan Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional dalam waktu dekat.”

Pemerintah sendiri nampaknya menyadari bahwa status Trowulan yang belum ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya menjadi salah satu faktor mengapa persoalan pabrik baja dapat terjadi. Persoalan dan masalah telah muncul, mulai dari persoalan penggalian lahan yang justru menghancurkan sisa-sisa peninggalan Majapahit hingga kasus pembangunan Pusat Informasi Majapahit, sehingga pemerintah akhirnya merasa perlu untuk memberikan status kawasan cagar budaya kepada Trowulan. Meskipun demikian tetap menjadi pertanyaan mengapa kesadaran pemerintah ini tidak dibarengi dengan upaya-upaya yang lebih konkret.

Selain itu, dalam upaya meyakinkan masyarakat berkaitan dengan pabrik baja itu pemerintah menegaskan dalam tanggapannya tentang langkah-langkah yang telah diambilnya :

“Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman bersama dengan beberapa anggota Tim Ahli Nasional Cagar Budaya telah melakukan audiensi dengan pihak Bupati Mojokerto pada tanggal 14 Agustus 2013, selaku pihak yang mengeluarkan izin pembangunan pabrik baja dimaksud, dan pihak pengembang.”

Tindakan Bupati Mojokerto untuk memberikan rekomendasi IMB kepada perusahaan memang patut dipertanyakan, mengingat belum jelasnya status “kawasan” berkaitan dengan ada tidaknya situs di bawah tanahnya. Persoalannya adalah apabila tidak ditemukan adanya sisa-sisa peninggalan Majapahit di lahan yang akan dijadikan lokasi pabrik baja itu tentu saja pembangunan

pabrik baja tersebut tidak akan bertentangan dengan amanat UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, tapi apabila memang ditemukan sisa-sisa peninggalan kuno di lahan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun belum memiliki justifikasi yang kuat untuk menolaknya karena masih menggunakan konsep klaster-klaster seperti yang tercantum dalam RIA Majapahit 1986 dan belum mensahkan konsep kawasan. Karenanya, lahan tersebut memang berada di luar klaster-klaster, yang artinya sah-sah saja apabila dijadikan sebagai tempat berdirinya berbagai jenis bangunan.

4.5. Para Pencinta Majapahit

Masyarakat Mojokerto memang beragam dalam menjawab atau merespon isu pelestarian dan pengembangan kebudayaan Majapahit di Trowulan. Selain mereka yang pada umumnya menerima dan bahkan mendukung, di Mojokerto terdapat juga orang-orang yang sangat mendukung upaya pelestarian tersebut. Bahkan lebih jauh mereka terkesan berlebihan dalam menanggapi upaya pelestarian situs Majapahit di Trowulan tersebut. Mereka adalah orang-orang yang menginginkan Majapahit kembali hidup, meskipun secara fisik mereka juga merasa sulit untuk merealisirnya. Apa yang mereka harapkan adalah Majapahit setidaknya secara kultural bisa hidup kembali di tengah Masyarakat Indonesia modern, dan terutama di daerah Mojokerto.

Budhi adalah seorang Jawa yang memimpikan kembalinya Majapahit tersebut. Meskipun alasan Budhi kadang tidak begitu kuat dan tidak masuk akal, mimpi kembalinya Majapahit tadi telah lama menjadi obsesinya. Itulah sebabnya dia kemudian mendirikan suatu kelompok yang dia namai “Relawan Majapahit”. Organisasi atau perkumpulan yang baru dia dirikan

beberapa tahun belakangan ini mendapat sambutan belasan orang dari masyarakat Mojokerto yang kemudian menjadi anggotanya. Mereka kelihatannya mempunyai ide yang sama, yaitu bukan saja mendukung pelestarian atau konservasi benda-benda cagar budaya dan memelihara situs Majapahit pada umumnya, melainkan juga menghidupkan kembali Majapahit itu sendiri. Dia menyebutnya dengan nama Majapahit II yang harus dibangun kembali di Mojokerto.

“Saya berharap betul agar Majapahit II bisa lahir muncul kembali di Mojokerto. Kebesaran Majapahit telah tercatat dalam sejarah. Akan tetapi, harapan untuk lahirnya kembali Majapahit tersebut agaknya masih banyak hambatan”. Demikian ungkap Budhi ketika diwawancarai⁶³ oleh penulis. Meskipun Budhi adalah seorang Muslim, kebanggaannya terhadap Majapahit tetap tertanam di dalam hatinya. Lebih lanjut Budhi mengatakan bahwa harapan seperti itu terutama muncul pada masyarakat Hindu Bali yang merasa leluhurnya ada di Mojokerto. Orang seperti Budhi memang bermunculan termasuk di daerah Trowulan sendiri, karena mereka mempunyai keinginan kuat untuk menghidupkan kembali kebudayaan Majapahit yang dengan demikian diharapkan akan memberi kesejahteraan pada masyarakat lokal. Dengan hidupnya kebudayaan Majapahit, maka kesejahteraan masyarakat lokal akan meningkat karena hadirnya Majapahit ini akan mendorong kalangan Hindu untuk berziarah ke Trowulan, yang berarti juga mendatangi Mojokerto. Menurutnya sudah banyak anggota masyarakat Bali yang mengadakan ritual di Trowulan.

Konon Budhi pernah mengusulkan kepada Bupati untuk membuat replika Majapahit. Usulan Budhi ini disetujui oleh

⁶³Wawancara tanggal

Bupati, sehingga dia kemudian mendatangi Menteri Pariwisata dan mendiskusikan keinginannya tersebut bersama Bupati. Upaya-upaya ini dilakukan Budhi, terutama ketika kepemimpinan negara dipegang oleh Megawati. Menurut Budhi, dia berharap sekali bahwa kelahiran Majapahit II tadi disertai dengan segala kemajuannya, termasuk dibangunnya kembali berbagai pura di wilayah Mojokerto dengan maksud agar masyarakat Mojokerto sejahtera, karena menurutnya, didirikannya berbagai pura tadi, akan secara otomatis mengundang datangnya masyarakat Bali dari yang tua sampai yang muda berkunjung ke Mojokerto.

Banyaknya kunjungan tadi, dalam harapan Budhi, akan ikut mensejahterakan orang-orang Mojokerto. Cendera mata akan berkembang sesuai dengan kebutuhan para turis. Dengan demikian, ekonomi Mojokerto akan ikut berkembang sejalan dengan perkembangan turisme tersebut. Akan tetapi, Budhi merasakan masih banyaknya orang yang tidak setuju dengan idenya, terutama orang-orang yang seakan-akan “Islam betul” (maksudnya kalangan Islam santri). Menurut Budhi kekhawatiran kalangan Islam tadi berkaitan dengan berkembangnya agama Hindu yang seolah terfasilitasi oleh berkembangnya pariwisata tadi. Orang seperti Budhi memang tidak mempersoalkan masalah-masalah agama, karena yang dia inginkan adalah berkembangnya kesejahteraan yang bisa dimunculkan melalui perkembangan kebudayaan atau khususnya pariwisata.

Hubungan antara pariwisata dan peningkatan kesejahteraan pastilah ada. Pikiran praktis yang dipunyai oleh orang seperti Budhi adalah bahwa perekonomian dalam masyarakat Trowulan dan Mojokerto pada umumnya bisa diperbaiki dengan mengembangkan pariwisata di daerah tersebut, mengingat melalui bidang lain hal tersebut terasa agak sulit dilakukan. Tetapi untuk membuka dan mengembangkan pariwisata tersebut

sederet persyaratan harus dipenuhi, yaitu hadirnya objek-objek wisata yang berasal dari warisan budaya Majapahit. Dengan demikian, para perencana haruslah melihat kembali keagungan Majapahit, lalu membuatnya hal ini seperti berujud lagi sekarang. Budhi menegaskan bahwa dengan warisan budaya yang ada, orang-orang dari luar Mojokerto akan datang melihatnya meskipun hanya berupa budaya tak bergerak.

Seperti sudah disebutkan di atas, Budhi memang tidak sendirian dalam hal ide mengembangkan kebudayaan Majapahit itu. Di Mojokerto juga terdapat sejumlah LSM yang juga mempunyai ide yang mirip dengan ide Budhi. Kepala Desa Trowulan yang kebetulan memimpin Desa di wilayah situs Majapahit, misalnya, ternyata mempunyai angan-angan seperti Budhi. Menurutnya, dengan datangnya orang-orang asing yang beragama Hindu ke Trowulan, maka dengan sendirinya akan menyediakan banyak kegiatan mulai dari mengembangkan bisnis sampai pada hal lainnya yang dilakukan oleh masyarakat Trowulan sendiri. Kades ini yakin sekali bahwa orang-orang India akan mendatangi Trowulan jika di sana dibangun banyak pura karena Trowulan bagi orang Hindu adalah tempat agama Hindu dikembangkan di Nusantara dan bahkan pernah menjadi pusat agama Hindu.

Majapahit memang telah menginspirasi orang seperti Budhi yang punya keinginan untuk membangunnnya kembali dengan nama Majapahit II. Menurutnya kerajaan ini begitu besar dan telah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pada masa Majapahit, menurut Budhi, telah berkembang juga agama lain seperti Islam, di mana masyarakatnya hidup berdampingan. Apa yang penting dalam kehidupan Majapahit adalah tumbuhnya toleransi antara pemeluk agama saat itu, sehingga kehidupan “gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertoraharjo” yang

menggambarkan kesejahteraan telah dicapai di jaman itu. Oleh karena itu, membangun kembali Majapahit adalah upaya yang harus diperjuangkan agar bisa memperkuat toleransi yang tidak mudah dilakukan oleh anak bangsa sekarang ini. Toleransi yang membawa kerukunan adalah keharusan, karena kerukunan umat beragama pasti akan membawa kesejahteraan, karena dengan kerukunan berarti bukan saja tidak ada kebencian tetapi juga di sana akan ada saling mendukung antar umat beragama. Karena kerukunan adalah kunci bagi hidupnya keberagaman dalam beragama, dan keberagaman adalah bagian penting bagi pengembangan kebudayaan dan pengembangan kebudayaan adalah faktor penting bagi kesejahteraan, maka orang-orang seperti Budhi mengharapkan dibuatnya peraturan yang lebih longgar agar pendirian tempat-tempat ibadah bisa dipermudah. Pembatasan-pembatasan yang ada, dalam penilaian Budhi, adalah indikasi tidak rukunnya umat beragama karena di sana terdapat upaya-upaya untuk menghambat atau bahkan menjatuhkan agama lain.

Lebih jauh Budhi menjelaskan bahwa Majapahit bukanlah negara kaya, tetapi dalam Majapahit tergambar adanya kebesaran yang diciptakan oleh masyarakatnya yang cerdas. Lebih dari itu, apa yang perlu diciptakan sekarang sebagai replika kecerdasan itu adalah diberikannya kebebasan dan toleransi dalam perbedaan yang dulu menandai kebesaran Majapahit. Perbedaan dalam bidang agama adalah salah satu saja dari indikator yang mempengaruhi kebesaran Majapahit. Konon saat itu perbedaan agama cukup dihargai atau setidaknya dibiarkan ada, karena saat itu meskipun Hindu menjadi agama masyarakat dan mungkin juga agama negara, Islam telah berkembang dan dibiarkan perkembangannya sedemikian rupa.

Dengan kenyataan seperti itu, menurut Budhi, maka sebetulnya keragaman keagamaan seperti itu harus juga dibiarkan berkembang sekarang di Trowulan ini. Lebih-lebih, keragaman itu juga akan menjadi daya tarik para wisatawan atau penziarah, yang ingin melihat warisan atau gambaran Majapahit yang berada di Trowulan itu. Dengan hadirnya pura di sekitar Trowulan, mereka yang berasal dari Bali yang merasa punya hubungan historis dengan Trowulan sebagai ibu kota Majapahit akan datang ke desa kecil di wilayah Mojokerto ini. Bahkan dimungkinkan mereka yang berasal dari India akan juga mengunjungi Trowulan, sebagai daerah yang dulunya merupakan tempat berkembangnya agama Hindu. Dengan kata lain, dalam pandangan Budhi, Trowulan akan menarik mereka yang beragama Hindu untuk datang ke sana sebagai bagian dari kegiatan religius, seperti halnya orang Islam mengunjungi Mekkah.

Trowulan sendiri, menurut kadesnya, adalah desa mati, karena secara ekonomi tidak menghasilkan apa-apa. Sejauh ini, masyarakat desa di sini sangat membantu BP3 dalam upaya mengembangkan atau menjaga warisan budaya Majapahit di sana. Oleh karenanya, desa ini harus dibangun melalui pariwisata, mengingat secara jujur diakui bahwa Trowulan belum memberikan manfaat apa-apa bagi masyarakatnya. Pembangunan bangunan-bangunan milik pemerintah di sana terkadang juga dengan mengabaikan tenaga kerja lokal yang sebenarnya sangat membutuhkan pekerjaan. Jadi, masyarakat tentu saja sudah memberikan dukungan bagi upaya pelestarian, tetapi kalau hanya mendukung saja hal tersebut tidak juga menyelesaikan masalah, karena mereka dari sisi lain harus meningkatkan taraf dan kehidupan ekonominya.

Pada tahun 1970an banyak orang Trowulan memproduksi bata merah. Keahlian yang turun temurun itu sekarang sudah jauh menurun, karena di samping adanya aturan, yang meminta masyarakat supaya tidak menggali tanah agar benda-benda cagar budaya yang mungkin ada di bawahnya tidak tergores atau rusak karena galian, juga karena kualitas tanah di Trowulan sebenarnya sudah menurun. Dengan demikian, maka produksi bata merah yang biasa disebut sebagai linggan itu makin menurun jumlahnya. Penurunan ini jelas ikut menurunkan perekonomian masyarakat yang kebanyakan hidup dari kegiatan produksi ini, sehingga dengan demikian banyak tenaga yang kemudian menganggur.

Menurut kades Trowulan, pengangguran di desanya cukup besar, karena tanah di sini sudah tidak produktif lagi bagi pengembangan usaha. Untuk pengembangan produksi bata saja, orang Trowulan mendatangkan tanah dari tempat lain. Sementara pertanian yang bertumpu pada pananaman padi sudah sejak lama tersingkir oleh hadirnya tebu yang dari sisi irigasi tidak berkembang, karena tebu memang tidak memerlukan air sebanyak padi. Kades Trowulan lebih jauh menegaskan bahwa sisa yang ada yang bisa mendorong pengembangan ekonomi desanya adalah pariwisata dan khususnya wisata religi. Dengan melihat sejarah Majapahit yang bercokol di Trowulan dan sekaligus menjadikan wilayah ini dulunya sebagai tempat atau pusat agama Hindu, maka wisata religi yang mungkin, dalam pandangan Kades, adalah dengan mengembangkan simbol-simbol kehinduan dengan mana masyarakat Hindu yang berasal dari berbagai negara bisa berziarah ke Trowulan.

Meskipun demikian, kehati-hatian menurutnya perlu diberikan karena dengan harapan seperti ini akan muncul orang-orang yang menggunakan agama Hindu dan simbol-simbolnya

untuk kepentingan pribadi. Hal seperti ini memang terjadi, misalnya dengan hadirnya pak Suryo yang mengaku sebagai raja Majapahit ke X yang kemudian mendirikan pura di sekitar kolam segaran. Menurut kades Trowulan, klaim pak Suryo tersebut adalah bualan yang tidak punya dasar. Karena tidak berdasar itulah, maka tidak ada yang mengakuinya sebagai keturunan Raja Majapahit. Hal seperti ini bisa terjadi juga di masa mendatang. Hanya memang menjadi pertanyaan kenapa kalangan Hindu tidak secara tegas menyatakan bahwa pak Suryo tidaklah mewakili kepentingan penganut Hindu.

Berkaitan dengan lahirnya gairah Majapahitan, masyarakat di Trowulan mulai mengadakan acara-acara yang berorientasi Majapahit, seperti kirab sesaji atau ruwatan desa yang menandakan syukuran atau berterima kasih kepada yang kuasa. Kirab ini memang bisa merupakan lambang atau pertanda sadarnya orang-orang Trowulan akan besarnya budaya Majapahit, sehingga kemudian mereka meniru atau sekedar memperingati saja. Akan tetapi, mengingat mereka bukanlah keturunan Majapahit, seperti sering dilansir orang, maka pelaksanaan tradisi semacam itu bisa saja terbatas pada upaya menghidupkan kebudayaan yang ada. Hal seperti ini sebenarnya merupakan gejala umum berkaitan dengan gairah orang atau ikut-ikutannya orang dalam menghidupkan tradisi yang hampir punah itu.

Dengan lahirnya Majapahit II, Mojokerto akan menjadi Bali kedua. Harapan menjadi Bali II ini dikaitkan dengan kemungkinan efek ekonomis yang diakibatkannya. Menurut mereka, dengan hadirnya Majapahit II ini berarti masyarakat akan dihinggapi kesejahteraan yang melimpah. Mereka mencontohkan Bali dengan segala kebudayaannya yang bisa menjadi konsumsi para turis asing. Dengan hadirnya Majapahit II,

kebudayaan agung dan kehidupan damai akan menandai masyarakatnya. Dengan hadirnya budaya itu yang tentunya dengan segala perangkat budaya fisiknya, seperti hadirnya pura-pura dan tempat ibadah umat lainnya, maka bukan hanya keindahan kebudayaannya yang akan jadi daya tarik orang-orang asing ini tetapi juga dalam Majapahit II terdapat daya tarik bathin yang akan menyedot para penganut Hindu, termasuk dari India misalnya, untuk datang ke Trowulan.

Para pendukung ide ini memang telah berupaya, misalnya, dengan cara menghubungi pihak pemerintah untuk memfasilitasi segala hal yang dibutuhkan bagi pembangunan atau merealisasikan Majapahit II tersebut. Meskipun ide ini kurang terkonstruksi secara logis, seperti terlihat dari penilaian tentang akan datangnya orang-orang Bali ke Trowulan untuk berziarah dan mengkaitkannya dengan hadirnya para turis asing, harapan atau bahkan mimpi ini seperti mendapat dukungan. Ide itu dikatakan mimpi, karena rekonstruksi Majapahit dengan segala wujud fisiknya seperti masih sangat jauh dari kemungkinan direalisasikan, mengingat upaya yang dilakukan baik oleh para arkeolog maupun dukungan pemerintah hanya terbatas pada penggalian barang atau benda cagar budaya dan menjaganya agar benda-benda yang masih berada di bawah tanah Trowulan itu tidak rusak karena ulah manusia. Para pihak kesenian, meskipun mereka mempunyai aspirasi yang agak berbeda, adalah yang paling kuat memberikan dukungan bagi terrealisirnya ide atau mungkin mimpi tentang Majapahit II ini, meskipun dengan nuansa yang berbeda.

4.6 Masyarakat Islam Santri

Pada dasarnya hampir semua orang Trowulan sepakat tentang perlunya pelestarian atau pemeliharaan cagar budaya

Majapahit. Pelestarian dan pemeliharaan ini adalah upaya mencatat dan bahkan memperlihatkan kepada dunia tentang kekayaan dan keluhuran kebudayaan Indonesia. Bangsa apapun akan bangga dengan kebudayaan yang diciptakan oleh nenek moyangnya dengan tanpa melihat apakah asal usul etnis dan agama nenek moyang tadi sama dengan mereka. Itulah sebabnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merouke bangga, misalnya, dengan hadirnya candi Borobodur yang dinilai banyak orang bahkan sebagai salah satu keajaiban dunia. Hal yang sama terjadi dengan berbagai peninggalan dari kerajaan Majapahit.

Penggalian dan pelestarian cagar budaya hasil cipta orang-orang Majapahit dan pemeliharaan situs Majapahit di daerah Trowulan adalah upaya mewujudkan kebanggaan bangsa tersebut. Majapahit sebagai kerajaan besar diduga menghasilkan produk budaya yang bernilai tinggi. Berkaitan dengan keluhuran hasil-hasil budaya ini, masyarakat setempat yang dimotori oleh beberapa orang memberikan dukungan pada upaya-upaya pelestarian dan pemeliharaan tersebut. Pemeliharaan cagar budaya yang sudah ada dan penggalian benda-benda budaya yang diduga masih berada di bawah tanah situs Majapahit akan memunculkan kebanggaan budaya yang pada sisi lain bisa menjadi modal bagi pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Dengan pariwisata, perkembangan ekonomi masyarakat Trowulan akan terbantu.

Di wilayah Trowulan sendiri memang sudah berkembang wisata ziarah, di samping adanya objek-objek wisata seperti candi dan benda-benda lainnya. Wisata ziarah bisa dikatakan lebih besar dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat di sana dibandingkan dengan wisata lainnya. Setidaknya ada beberapa objek wisata ziarah di daerah Trowulan ini, yaitu makam Putri Cempo, Kubur Panjang dan makam Troloyo, yang biasa

didatangi oleh masyarakat dari berbagai daerah terutama di Jawa. Di lihat dari sisi jumlah pengunjungnya makam Troloyo adalah yang terbesar dan berhasil mengundang ratusan ribu pengunjung dalam setiap bulannya. Bahkan banyak yang memperkirakan bahwa lebih dari 1,5 juta orang berkunjung ke makam ini dalam setiap bulannya, mengingat makam ini terbuka 24 jam untuk mereka yang mau berziarah. Dengan situasi yang seperti ini, para pedagang kecil lokal, dengan jumlah sekitar 200 lapak, membuka dagangan mereka untuk mengais rizki di sana.

Dengan dasar untuk pengembangan pariwisata yang bisa menguntungkan masyarakat lokal, berbagai kalangan memang mendukung program BP3 untuk memelihara dan melakukan penggalian untuk mendapatkan benda-benda cagar budaya. Sadar dengan kemungkinan bahwa hal seperti itu mempunyai impak bagi peningkatan ekonomi masyarakat, kalangan Islam santri di Trowulan telah pula ikut memberikan dukungannya. Akan tetapi dukungan bagi pelestarian cagar budaya dan situs Majapahit memang tidak sekedar berhenti pada titik untuk membangun kebanggaan budaya dan pengembangan pariwisata, karena dalam masyarakat terdapat juga mereka yang menggunakan kesempatan ini untuk kepentingan kebudayaan dan bahkan kepentingan agama mereka. Seperti sudah disebut di atas, di Trowulan ini terdapat sedikit orang yang memimpikan kembalinya kerajaan Majapahit. Meskipun mereka tidak mempunyai konsep yang jelas berkaitan dengan mimpinya tersebut, mereka berupaya untuk menghadirkan apa yang mereka sebut sebagai Majapahit II.

Upaya menghadirkan Majapahit II ini memang dimulai dengan pembelian lahan oleh orang bersangkutan secara diam-diam. Pembelian ini terutama berkaitan dengan penyediaan lahan untuk pendirian pura sebagai simbol Majapahit yang telah

menggunakan Hindu sebagai agama kerajaan. Ini artinya bahwa mereka telah membeli lahan dari masyarakat di sana dengan tanpa memberitahukan peruntukan lahan tersebut. Pembelian seperti ini dimaksudkan agar tidak memunculkan masalah, karena bila saja sejak awal telah diberitahukan bahwa lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan pura, maka bisa dipastikan lahan tersebut tidak akan dijual. Rencana mendirikan pura itu memang sudah agak matang, akan tetapi karena masyarakat terkejut dan kemudian menolak, maka lahan yang berada di dekat candi tikus tersebut menjadi terbengkalai.

Perkembangan seperti itu telah memunculkan kekhawatiran sebagian masyarakat Islam, karena perwujudan kembali Majapahit II berarti kembalinya Hinduisme dalam kehidupan masyarakat Trowulan⁶⁴. Mimpi sebagian kecil masyarakat tentang Majapahit II ini juga diwujudkan oleh mereka, misalnya dalam upaya mereka membangun tempat ibadah agama Hindu tadi. Upaya ini kemudian memunculkan konflik karena sebagian besar umat Islam di Trowulan tidak menghendakinya, bukan saja karena hal tersebut di luar rencana pelestarian dan penggalian kebudayaan Majapahit dengan menampilkan benda cagar budaya yang ada di dalam tanah Trowulan tetapi juga sudah masuk pada wilayah membangkitkan semangat agama.

Oleh karena itulah, rencana penggalian dan sekaligus pelestarian budaya Majapahit ini disikapi dengan was-was oleh kalangan masyarakat Islam. Upaya mendirikan pura yang dilakukan oleh orang Hindu berasal dari Bali ditolak mentah-mentah oleh masyarakat setempat. Pendirian pura di depan

⁶⁴Wawancara dengan tokoh Islam Trowulan, KH. Irfan pada2013.

Kolam Segaran telah memunculkan protes yang kemudian terbuka dan akhirnya juga melibatkan pemerintah dalam menyelesaikannya. Pak Suryo yang mendirikan pura tersebut dihujat oleh masyarakat dan diminta agar pura yang sudah berdiri tersebut dibongkar. Dalam hal ini masyarakat merasa dibohongi oleh yang bersangkutan yang semula membangun pura tersebut untuk kepentingan tempat ibadah pribadi tetapi kemudian menjadikannya sebagai tempat ibadah umum umat Hindu.

Kasus Suryo memang bergulir cukup ramai, sehingga hal tersebut melibatkan para pejabat pemerintah untuk menyelesaikannya. Seperti segelintir orang di Mojokerto, Suryo adalah orang yang memimpikan lahirnya Majapahit II. Tetapi apa yang membuat sebagian orang Islam protes dan bahkan marah dengan upayanya mendirikan pura adalah karena dia dianggap menghina Islam, yang disebutnya sebagai agama pendatang. Selain itu, dia juga membuat mushola di dalam pura, yang merupakan tempat ibadah umat Hindu itu.⁶⁵ Suryo kemudian meminta maaf kepada umat Islam atas pernyataannya tadi, yang dia tulis dalam surat bersegel dengan diketahui oleh saksi-saksi, di antaranya Camat dan Kapolsek Trowulan. Dalam surat tersebut, Suryo juga menegaskan bahwa dia akan mencabut papan nama bertuliskan “Pura Majapahit” yang dia pasang di beberapa tempat, di samping akan memendekkan tinggi pura dari 9 menjadi 5 meter. Protes lain pun muncul dari masyarakat disertai teguran dari camat Trowulan karena Suryo tidak

⁶⁵Dua kali kami (peneliti) mampir ke rumah Suryo untuk wawancara, tetapi selama itu pula kami tidak bisa menjumpainya. Ketika sampai di rumahnya, kami disambut oleh para pembantu Suryo yang mempersilahkan kami menunggu di toko kecil di depan rumahnya. Pembantu tersebut masuk ke rumah, dan tak berapa lama keluar lagi dengan jawaban bahwa Suryo atau Eyang Suryo tidak berada di rumah, melainkan sedang di Bali.

memenuhi janjinya seperti dia nyatakan dalam surat bersegel tersebut.

Dengan kejadian seperti itu, maka masyarakat Islam di Trowulan dan sekitarnya resah. Penggalan benda cagar budaya Majapahit atau pelestariannya dianggap sama dengan orang Hindu akan masuk kembali atau akan menghidupkan Hindu kembali di Trowulan setelah adanya orang-orang Hindu yang mau membangun pura di sana. Sementara itu, tak satu pun masyarakat di Trowulan beragama Hindu. Tentu saja persepsi ini memunculkan kekhawatiran, bukan saja karena Hindu memang berbeda dengan Islam tetapi juga bagi orang Islam ini artinya penyerangan terhadap Islam sendiri. Kekhawatiran ini didasarkan pada bukti bahwa belakangan ini ada upaya-upaya dari orang Hindu untuk membangun pura di sekitar Trowulan tadi. Apa yang paling nyata adalah bahwa di Trowulan sekarang ini telah berdiri sebuah pura persis di depan segaran (danau) yang konon dulu merupakan danau di depan istana Majapahit.

Selain upaya mendirikan pura, sebagian kecil masyarakat memang juga sudah mulai menghidupkan budaya atau berperilaku sebagai pewaris Majapahit. Di Trowulan ini, misalnya, ada satu atau dua orang anggota masyarakat dan bahkan kepala desanya yang akhir-akhir ini memakai blankon yang sebenarnya dalam kehidupan masyarakat di sana merupakan hal yang tidak biasa. Pemakaian ini adalah bagian dari simbolisasi Majapahit dengan maksud untuk memperlihatkan apresiasi mereka terhadap Majapahit dan keinginan mereka untuk menghidupkan kembali budaya dan simbol-simbolnya. Tindakan penghidupan seperti itu memang punya maksud, yaitu diharapkan bahwa Majapahit akan kembali hidup di wilayah Trowulan ini. Jika hidup, dalam pandangan Kepala Desa Trowulan, maka hal itu akan memberikan manfaat bagi masyarakat bersangkutan, karena

dengan demikian bukan saja produk-produk lokal berupa patung atau benda kesenian lainnya akan hidup kembali tetapi juga, pada sisi lain, diduga akan memberikan keuntungan ekonomi.

Dengan demikian, keberatan masyarakat dengan perkembangan yang ada adalah karena hal tersebut membawa di dalamnya nilai-nilai agama atau ikut menghidupkan kembali keagamaan Hindu. Akan tetapi, kalangan Islam ini tidak memperlakukan soal pariwisata dalam kegiatan pelestarian cagar budaya yang ada, karena hal itu akan membantu ekonomi masyarakat. Apa yang mereka tidak setuju adalah jika upaya-upaya itu disertai dengan pengembangan agama Hindu. Penolakan tersebut memang sudah terjadi bahkan pada sepuluh tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2001. Meskipun demikian, sikap sebagian kecil masyarakat Trowulan dan Mojokerto pada umumnya berkaitan dengan mimpinya tentang Majapahit II ini terus berlanjut. Dengan bermacam alasan, orang-orang ini bukan hanya mentolerir didirikannya pura-pura, seperti di masa jayajayanya Majapahit, tetapi juga keberadaan pura tersebut menjadi keharusan karena hal itu adalah bagian yang akan menarik wisatawan.

Dengan melihat kejadian di atas, kontestasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan pelestarian dan pemeliharaan situs Majapahit ini tak terelakkan terjadi. Untuk beberapa kelompok atau pemangku kepentingan, kontestasi tersebut berkaitan dengan pengakuan ke-Majapahit-an. Majapahit telah dikonstruksi oleh mereka sebagai lambang dan simbol keagungan dalam kehidupan berbangsa masyarakat Jawa dan Nusantara. Kepala Desa Jatipasar, yang rumahnya berada di depan pintu gerbang masuk Majapahit, misalnya, menegaskan tentang kebesaran Majapahit ini. Meskipun demikian, berbeda dengan para pemimpi tadi dia melihat kebesaran ini sebagai fakta

sejarah yang tidak harus diwujudkan dalam bentuk fisik dalam kehidupan masyarakat sekarang⁶⁶. Menurutnya, sangat tidak mungkin untuk mengembalikan Majapahit pada kehidupan masyarakat sekarang, sehingga membangun dan mendirikan kembali kerajaan Majapahit adalah mimpi yang tidak berdasar. Apa yang penting, menurutnya, adalah mengambil nilai-nilai kebudayaan Majapahit, yang bisa dilihat dari produk budayanya.

Penilaian keagungan Majapahit seperti itu telah menyebabkan munculnya beragam kelompok dengan mengklaimnya sebagai bagian atau keturunan dari Majapahit, atau setidaknya mengaku sebagai bagian dari kelompok atau bangsa Majapahit. Pengakuan seperti itu memang sudah dibantah secara tidak langsung oleh beberapa orang tokoh masyarakat Trowulan sendiri. Mereka menyatakan bahwa tidak ada keturunan Majapahit di daerah Trowulan tersebut. Para penduduk Trowulan sekarang dan daerah sekitarnya adalah para pendatang dari daerah Jawa lainnya. Menurut penegasan para tokoh ini, mereka yang benar-benar keturunan Majapahit adalah kalangan Hindu yang ada di Bali sekarang ini. Itulah sebabnya kenapa kemudian muncul klaim dari orang Bali yang bertandang ke Trowulan bahwa merekalah keturunan Majapahit yang asli.

Meskipun demikian, perlu ditegaskan di sini bahwa bagi sebagian umat Islam di Trowulan soal ke-Majapahit-an tadi memang bukanlah masalah. Mereka dalam hal ini bersikap seperti kebanyakan orang Indonesia pada umumnya yang bangga dengan Majapahit bukan karena mereka merasa sebagai bagian dari Majapahit. Mereka tidak peduli mau disebut sebagai keturunan Majapahit atau bukan. Andai pun mereka ini disebut

⁶⁶Rekaman dalam FGD tanggal 5 Juni 2013 di Museum Trowulan, Mojokerto.

sebagai bagian atau keturunan Majapahit, maka hal itu tidak akan mengurungkan ketidaksetujuan mereka dalam hal pendirian pura yang oleh sebagian kecil orang di Trowulan dianggap sebagai simbol keagungan Majapahit. Mereka setuju dengan pelestarian benda cagar budaya Majapahit dan upaya pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk memelihara benda budaya Majapahit yang ada. Tetapi mereka tidak setuju dengan pendirian pura-pura tersebut karena hal itu berkaitan dengan pengembangan agama Hindu. Mereka khawatir akan terjadi pemurtadan (pindahan agama) terhadap umat Islam yang ada.

Sebagian dari umat Islam memang menyambut spirit kebangunan kembali Majapahit atau keinginan banyak orang untuk menyelamatkan situs Majapahit di Trowulan. Penyambutan ini selain hanya diperlihatkan oleh sebagian kecil dari mereka juga memang terbatas pada atau disebabkan oleh adanya kepentingan ekonomi. Mereka senang bahwa pemeliharaan situs di Trowulan secara keseluruhan dan pengembangan wisata sebagai akibat dari dihidupkannya kembali sindrom Majapahit, akan mendatangkan keuntungan ekonomi. Dalam hal ini para pedagang yang hidup dari para wisatawan yang datang ke sana menyambut gembira rencana, baik berkaitan dengan pemeliharaan situs Majapahit maupun penggalian benda-benda cagar budaya yang terdapat di dalamnya.

Dengan demikian, jelaslah bahwa kontestasi yang muncul berkaitan dengan pembangunan kembali Majapahit atau pemeliharaan situs Majapahit cukup bervariasi, seperti juga diperlihatkan oleh bervariasinya para *stakeholder* yang terlibat. Ada yang benar-benar bermotif ekonomi seperti para pedagang kecil di sekitar benda-benda cagar budaya, seperti candi dan lainnya, dan ada pula yang bermotif agama seperti diperlihatkan oleh beberapa orang Hindu yang berdatangan ke Trowulan.

Selain itu, para akademisi, arkeolog dan pemerintah juga mempunyai kepentingan yang berbeda berkaitan dengan masalah atau issue pemeliharaan situs di Trowulan ini. Pemerintah dalam hal ini akan diposisikan oleh para *stakeholder* lain sebagai pelaku yang ikut terlibat dalam pembangunan dan pelestarian situs Majapahit itu dan pemeliharaan benda-benda budayanya meskipun sebenarnya lebih bertindak sebagai regulator.

BAB 5

P E N U T U P

Pelestarian warisan budaya di Trowulan sebenarnya telah dimulai sejak zaman kolonial dengan diawali oleh hadirnya komunitas-komunitas pecinta benda-benda antik. Tapi potensi budaya dan ekonomi yang melekat pada warisan budaya tersebut telah mendorong penguasa kolonial memberi perhatian besar dan bahkan ikut mengatur pelestariannya. Raffles, sang Gubernur Jenderal Inggris yang berhasil menulis *The History of Java*, telah memerintahkan bawahannya untuk mengkaji Trowulan, yang tentunya dengan maksud untuk kepentingan kolonialismenya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Belanda, yang kemudian menjadikan Trowulan untuk kajian arkeologis mereka. Trowulan, di mana situs Majapahit berada, memang penting bagi pemerintah kolonial, sehingga mereka kemudian mengambil alih kewenangan pengelolaan dan pelestarian warisan budayanya. Dengan menggunakan bantuan para ahli indologi, kontruksi warisan budaya Majapahit di Trowulan dilakukan sesuai dengan kepentingan kolonial. Keterlibatan pemerintah kolonial dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk perlindungan terhadap warisan budaya Trowulan tetapi lebih ditujukan untuk menaikkan citra mereka di mata internasional. Selain itu, keterlibatan ini juga dimaksudkan untuk membedakan derajat mereka dengan masyarakat pribumi, yang dianggapnya inferior.

Keterlibatan negara atau penguasaannya dalam pengelolaan warisan budaya juga terjadi pada masa Indonesia merdeka. Lembaga-lembaga pemerintah kolonial yang bergerak dalam pelestarian warisan budaya ini telah bermetamorfosis menjadi lembaga-lembaga pelestarian di bawah pemerintah Indonesia.

Metamorfosa serupa juga terjadi dalam aturan hukum Belanda yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang tentunya memiliki substansi sama meskipun dengan versi yang berbeda. Dengan perkembangan seperti itu, pemerintah Indonesia lah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sempat berubah nomenklatur menjadi Kementerian Pendidikan dan Pariwisata), yang mengatur warisan budaya, termasuk di Trowulan. Melalui para birokratnya dengan dibantu oleh para ahli, terutama dengan latar belakang akademis, pemerintah merumuskan berbagai kebijakan program pelestarian di Trowulan.

Terutama pada masa Orde Baru, perhatian pemerintah terhadap Trowulan makin meningkat, dengan cara memperkenalkan simbol-simbol Majapahit, dengan maksud untuk kepentingan kesatuan, di samping juga pernah menjadikannya sebagai alat politik untuk memperluas kekuasaan wilayah NKRI, karena Majapahit juga ditempatkan sebagai konstruksi politik. Dengan kecenderungan pemerintah seperti itu, upaya-upaya melestarikan peninggalan-peninggalan Majapahit akhirnya menjadi perhatian umum dan hipotesis para akademisi bahwa Trowulan sebagai ibukota Majapahit telah digunakan oleh pemerintah untuk untuk menjustifikasi upaya-upaya pelestariannya. Tahun 1986, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan Rencana Induk Arkeologi (RIA) Bekas Kota Kerajaan Majapahit Trowulan. *Masterplan* RIA tersebut kemudian dijadikan sebagai pedoman dan batasan-batasan dalam menjalankan misi perlindungan sisa-sisa peninggalan Majapahit di Trowulan.

Dalam perumusan RIA Bekas Kota Kerajaan Majapahit Trowulan, pemerintah dengan bantuan para akademisi menggunakan konsep “situs” dan “pelestarian” dalam konteks perlindungan fisik situs. Tetapi perhatian berlebih terhadap fisik

situs ini mengakibatkan terlupakannya aspek lain dari situs, yaitu keberadaan masyarakat, padahal masyarakat Trowulan telah menjalani kehidupan mereka di sekitar situs jauh sebelum pemerintah merumuskan RIA. Pengabaian masyarakat ini telah menjadikan pelestarian Trowulan menjadi semakin kompleks. Seperti diketahui sebelum RIA dibentuk, banyak aktivitas masyarakat dianggap merusak sisa-sisa peninggalan Majapahit di Trowulan, seperti penggalian untuk pencarian harta karun, pembuatan semen merah dari batu bata kuno, atau penggalian lahan untuk sawah dan industri bata, di samping adanya klaim masyarakat atas bangunan Majapahit. Aktivitas-aktivitas tersebut tidak serta merta berakhir, dan malah makin menjadi-jadi, justru setelah RIA dijalankan, karena masyarakat tidak diajak bicara dalam rencana pelestarian ini, padahal tanah-tanah di Trowulan merupakan hak milik sah mereka.

Dalam perjalanannya, masalah pelestarian di Trowulan ini terasa semakin kompleks karena terdapat sebagian oknum pemerintah yang memanfaatkan kesempatan pada setiap program pelestarian. Bahkan dalam kasus ini diduga adanya oknum pemerintah yang terlibat dalam perdagangan ilegal benda-benda peninggalan Majapahit di Trowulan. Negara dalam hal ini dianggap atau dinilai belum mampu merumuskan politiknya di bidang kebudayaan, karena apa yang terjadi adalah dominannya kepentingan politik dan ekonomi dengan mengatasnamakan pelestarian warisan budaya. Sebagai contoh adalah kasus pendirian Pusat Informasi Majapahit, yang bukan memunculkan kepentingan berbeda antara masyarakat dan pemerintah, melainkan juga muncul di sana kepentingan lembaga swadaya masyarakat (LSM-LSM) yang bergerak atas nama klaim pelestarian.

Dalam upaya pelestarian ini pemerintah dianggap lebih berpihak pada dunia usaha, seperti nampak ketika pendirian pabrik baja di Trowulan. Kali ini bahkan bukan pemerintah pusat yang berhubungan dengan pengusaha, melainkan bupati yang ikut terlibat dalam memberikan lahan kepada dunia usaha dimaksud. Meskipun demikian, karena pihak yang mempunyai wewenang mengeluarkan izin atas lahan di Trowulan adalah pemerintah pusat, maka berjalannya proses pembangunan pabrik baja tersebut mengindikasikan adanya oknum pemerintah pusat yang terlibat. Masyarakat Trowulan memang marah dengan rencana pendirian pabrik ini, tetapi di sana juga ada yang secara diam-diam setuju, sehingga dalam kasus ini terdapat dua kubu masyarakat.

Dengan munculnya kasus-kasus di atas memang terlihat bahwa pemerintah memang bukan “entitas tunggal” dalam kaitannya dengan persoalan yang muncul akibat program-program pelestarian. Meskipun sebenarnya hanya oknum tertentu yang terlibat dalam memanfaatkan program-program pelestarian untuk kepentingan politik dan ekonomi mereka, hal ini telah memperburuk citra pemerintah di depan masyarakat. Tapi perlu dicatat bahwa citra jelek ini sebagai akibat dari tidak seriusnya mereka dalam memahami persoalan yang hadir dalam pelestarian warisan budaya di Trowulan. Mereka selalu merasa sudah memahami sekali program-program pelestarian tersebut, padahal sesungguhnya dalam beberapa kasus pelestarian di Trowulan, klaim-klaim pelestarian telah dimanfaatkan untuk menutupi kepentingan politik ekonomi semata.

Dengan situasi seperti itu, program pelestarian Trowulan telah memunculkan beragam masalah, mulai dari munculnya berbagai kepentingan antara *stakeholder* sampai pada konflik antar kelompok masyarakat, seperti kasusnya pak Suryo yang

mendirikan pure Majapahit. Karenanya, intervensi pelestarian melalui program-program yang ada dalam prakteknya tidak pernah mencapai tujuan yang direncanakan. Tidak lengkapnya diagnosa terhadap masalah yang ada, dan tidak kuatnya motivasi pemerintah untuk benar-benar melakukan pelestarian serta kurangnya mempertimbangkan kepentingan masyarakat pada umumnya adalah faktor penyebab yang memunculkan masalah tersebut.

Kasus pembangunan Pusat Informasi Majapahit (PIM) dapat dijadikan sebagai contoh di mana pemerintah yang awalnya ingin mengembangkan kepentingan pelestarian, menghadapi berbagai macam persoalan karena persiapan yang tidak matang dan munculnya aktor-aktor yang ingin memanfaatkan situs. Upaya pelestarian yang diharapkan pada akhirnya seolah berubah menjadi upaya yang menyebabkan adanya kerusakan cagar budaya Trowulan oleh pemerintah. Tapi perlu dicatat bahwa kegagalan seperti ini bukan semata-mata karena kurangnya perencanaan, melainkan juga disebabkan karena banyaknya kepentingan tadi, termasuk dari kalangan pemerintah sendiri. Para ilmuwan yang terlibat, terkadang harus bernegosiasi dengan para birokrat pemerintah, sehingga seperti melebar dari tujuan awal pelestarian. Kompromi distribusi kekuasaan seolah terjadi di sana, dan mereka yang tetap kritis pada akhirnya akan menjadi orang-orang yang tersingkirkan.

Dari kasus-kasus yang ada memang jelas bahwa pengelolaan cagar budaya akan melibatkan banyak pihak, di mana mereka, mulai dari pemerintah, akademisi, masyarakat, sampai pada dunia usaha mempunyai posisi penting dalam perencanaan pengelolaan dan pengaturan warisan budaya Trowulan. Dalam hal ini semua pihak harus mempunyai visi yang sama dan mengesampingkan kepentingan pribadi atau kelompok, dengan

mengarahkan program yang ada pada pengembangan Trowulan sebagai kawasan strategis, destinasi wisata, dan penunjang kesejahteraan masyarakat.

Koordinasi yang integratif antara *stakeholder* mungkin dapat menjadi langkah awal dari upaya pelestarian di Trowulan agar menjadi lebih efektif. Selain itu, lahirnya aturan hukum yang implementatif, seperti peraturan pemerintah tentang warisan atau cagar budaya, perlu segera disahkan. Pemerintah juga harus menciptakan situasi yang “harmoni” di tengah-tengah kontestasi yang berlangsung, di samping merevisi RIA yang sudah dianggap tidak lagi sesuai dengan kondisi lingkungan di Trowulan. Hal lain yang perlu dilakukan pemerintah adalah mempertegas batas-batas kawasan Trowulan, karena masalah batas inilah yang akan menjadi justifikasi untuk menetapkan Trowulan sebagai kawasan cagar budaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anderson, Benedict. 2001. *Imagined Communities*. Yogyakarta: Insist Press.
- Caporaso, James A. dan Davis P. Levine. 2008. *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm. 424-438.
- Direktorat Peninggalan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. 2007. Rekapitulasi data pelestarian situs/benda cagar budaya tidak bergerak seluruh Indonesia sampai dengan Februari 2007.
- Djafar, Hasan. 2012. *Masa Akhir Majapahit: Girindrawardhana dan Masalahnya*. Depok: Komunitas Bambu.
- Gomperts, Amrit, Arnoud Haag and Peter Carey. 2008. *Stutterheim's Enigma: The mystery of his mapping of the Majapahit kraton at Trowulan in 1941. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (BKI) 164-4 (2008)*.
- Gunawan, Restu. 2005. *Muhammad Yamin dan Cita-cita Persatuan*. Yogyakarta: Ombak.
- Handinoto. 2004. *Kebijakan Politik dan Ekonomi Pemerintah Kolonial Belanda yang Berpengaruh pada Morfologi (Bentuk dan Struktur) Beberapa Kota di Jawa*. Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 32, No. 1, Juli: 19 – 27.
- Kusumajaya, I Made. tt. *Mengenal Kepurbakalaan Majapahit di Daerah Trowulan*, Mojokerto: BP3 Jatim.
- Li, Tania Murray. 2012. *The Will To Improve*, Tangerang: Marjin Kiri.

- Lombard, Denys. 2005. *Nusa Jawa: Silang Budaya 1, Batas-Batas Pembaratan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Loulanski, Tolina. 2006. "Revising the Concept for Cultural Heritage: The Argument for a Functional Approach" dalam *International Journal of Cultural Property* 13, hlm. 207–233.
- Nordholt, Henk Schulte, Bambang Purwanto, dan Ratna Hapsari. 2008. "Memikir Ulang Historiografi Indonesia" dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Hapsari (ed). *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV – Jakarta; Denpasar: Pustaka Larasan.
- Paparan Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto Wilayah Kerja Provinsi Jawa Timur, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. 2010.
- Pemberton, John. 2010. "(Dis)Orientasi Budaya "Jawa" dalam Budi Susanto (ed). *Indonesia di Mata (mata-i) Postkolonialitas*. Yogyakarta: Kanusius.
- Raffles. Thomas Stamford. 2008. *The History of Java*. Hamongan Simanjuntak dan Revianto B. Santosa (ed). Yogyakarta: Penerbit Narasi
- Said, Edward. 1977. *Orientalism*. London: Penguin.
- Samuel, Hanneman. 2010. *Genealogi Kekuasaan, Ilmu Sosial Indonesia: dari Kolonialisme Belanda hingga Modernisme Amerika*. Depok: Kepik Ungu.
- Siswanto. 2012. "Menuju Konservasi Karst dan Situs-situs Arkeologinya, Kasus di Gunung Kidul Yogyakarta"

- dalam M. Irfan Mahmud dan Zubair Mas'ud (ed.). *Warisan Sumberdaya Arkeologi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Balai Arkeologi Jayapura dan Penerbit Ombak.
- Soediman. 1965. *Pusaka Majapahit di Trowulan, Mojokerto*.
- Soewarsono, dkk. 2007. *Nasionalisme Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah*. LIPI Press, Jakarta.
- Tanudirjo, Daud Aris. tt. *Dari Abdi Negara Menjadi Abdi Masyarakat: Masa Depan Pengelola Sumberdaya Arkeologi di Indonesia*. (unpublished)
- Tanudirjo, Daud A. 1995. "Theoretical trends in Indonesian archaeology" dalam Peter J. Ucko (ed.), *Theory In Archaeology: A World Perspective*. London: Routledge.
- Tanudirjo, Daud Aris. tt. *Warisan Budaya Majapahit dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Arkeologi*. (unpublished)
- Tanudirjo, Daud Aris. 2003. *Warisan Budaya Untuk Semua Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Indonesia Di Masa Mendatang*. Makalah disampaikan dalam Kongres Kebudayaan V di Bukittinggi, Sumatra Barat pada Sumatera Barat 19-23 Oktober 2003.
- Timothy, Dallen J dan Gyan P. Nyaupane (ed). 2009. *Cultural Heritage and Tourism in the Developing World: A Regional Perspective*. London and New York: Routledge.
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Vickers, Adrian. 2008. "Mengapa tahun 1950-an penting bagi Kajian Indonesia" dalam dalam Henk Schulte Nordholt,

Bambang Purwanto, dan Ratna Hapsari (ed). *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV – Jakarta; Denpasar: Pustaka Larasan.

Vlekke, Bernard H.M. 2008. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

Surat Kabar

Surat Kabar Warta Bali, 5 Februari 2003.

Wawancara

Wawancara dengan AD (inisial) pada tanggal 26 Maret 2013.

Wawancara dengan RD (inisial) pada tanggal 15 September 2013.

Wawancara dengan AN (inisial) pada tanggal 15 September 2013.

Wawancara dengan HY (inisial) pada tanggal 26 Maret 2013.

Wawancara dengan KP (inisial) pada 2012.

Wawancara dengan RSG (inisial) pada 27 Juni 2012.

Internet

Bappeda Kabupaten Mojokerto: Kami Tak Sembrono.
[http://surabaya.tribunnews.com/2013/07/19/bappeda-kabupaten-mojokerto kami-tak-sembrono](http://surabaya.tribunnews.com/2013/07/19/bappeda-kabupaten-mojokerto-kami-tak-sembrono) Didownload pada tanggal 15 September 2013.

Komisi X DPR Kunjungi Trowulan Dukung Cagar Budaya.
<http://www.tribunnews.com/regional/2013/09/12/komisi->

x-dpr-kunjungi-trowulan-dukung-cagar-budaya
didownload pada tanggal 15 September 2013.

Pembangunan Pabrik Baja di Aera Situs Majapahit Didemo.
<http://news.detik.com/read/2013/07/19/141855/2308075/475/pembangunan-pabrik-baja-di-area-situs-majapahit-didemo> didownload pada tanggal 15 September 2013.

Pembangunan Pabrik Baja di Trowulan dihentikan.
<http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/07/pembangunan-pabrik-baja-di-trowulan-dihentikan>
Didownload pada tanggal 15 September 2013.

Situs Trowulan jadi Pabrik Baja. <http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/07/situs-trowulan-jadi-pabrik-baja>
didownload pada tanggal 15 September 2013.